YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

RETNO PALUPI
NPM : 157310350

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	:	Retno Palupi
NPM	:	157310350
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 13 Maret 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Rahyunir Rauf., M.Si	**Yendri Nazir, S.Sos., M.Si**

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Mulianto, S.IP, M,Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	:	Retno Palupi
NPM	:	157310350
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 13 Maret 2020

Ketua,

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Sekretaris,

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Anggota,

Dr. H. Rayunir Rauf, M.Si

Anggota,

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 033/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 19 Feb 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 20 Feb jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Retno Palupi
NPM	:	157310350
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	***Implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Persyaratan Pengemudi di Kota Pekanbaru).***
Nilai Ujian	:	Angka : " 82.6 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1.
2.	Sylvina rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Anggota	3.
4.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Anggota	4.
5.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	5.
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., M.Si.	Notulen	6.

Pekanbaru, 20 Februari 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Retno Palupi
NPM	:	157310350
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 13 Maret 2020

Ketua,	An Tim Penguji Sekretaris,
Dr. Zainal, S.Sos., M.Si	**Sylvina Rusadi, S.Sos.., M.Si**

Mengetahui, Wakil Dekan I,	Turut Menyetujui Program Studi Ilmu Pemerintahan Ketua,
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si	**Budi Mulianto, S.IP, M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun,
tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu
kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung
tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu
ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi
dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta
sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang
tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus
kepada ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan
keponakanku serta adik adik tercintaku

dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril
serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang
setimpal, Amin…

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)" Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Budi Mulianto, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Drs. H. Rahyunir Rauf., M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan PenulisanSkripsi ini.
5. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya di dalam penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya diProdi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada seluruh pegawai Satlantas Polresta yang telah mengizinkan penulis untuk mengumpulkan data guna melengkapi berkas penulisan Skripsiyang sedang saya kerjakan.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagaibahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 13 Maret 2020
Penulis

Retno Palupi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**
PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**
BERITA ACARA ..... **iv**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **xv**
ABSTRAK ..... **xvi**
ABSTRACT ..... **xvii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 18
   1. Tujuan Penelitian 18
   2. Kegunaan Penelitian 18

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan 20
   1. Konsep Ilmu Pemerintahan 20
   2. Konsep Organisasi Pemerintahan 22
   3. Konsep Manajemen 23
   4. Konsep Kebijakan Publik 25
   5. Konsep Implementasi 28
   6. Konsep Lalu Lintas 33
B. Penelitian Terdahulu 35
C. Kerangka Pikir 38
D. Konsep Operasional 39
E. Operasional Variabel 42

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 43
B. Lokasi Penelitian 43
C. Informan Penelitian 44
D. Jenis dan Sumber Data 45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Teknik Pengumpulan Data 46
F. Teknik Analisis Data 47
G. Jadwal Kegiatan Penelitian 50

BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru 51
B. Profil Kepolisian Resort Pekanbaru 60
C. Visi dan Misi Polresta Pekanbaru 62
D. Tujuan, dan Sasaran Polresta Pekanbaru..... 64
E. Tugas Pokok Sat Lantas Polresta Pekanbaru 66
F. Struktur Organisasi Sat Lantas Polresta Pekanbaru 67

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden 69
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru 70
   1. Komunikasi 72
   2. Sumber Daya 86
   3. Disposisi 90
   4. Struktur Birokrasi 100
C. Kendala yang Dihadapi oleh Sat Lantas Pekanbaru dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 111

BAB VI :PENUTUP

A. Kesimpulan..... 113
B. Saran..... 115

DAFTAR PUSTAKA..... 118

LAMPIRAN..... 120

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel			Halaman
I.1	:	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2016	7
I.2	:	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2017	8
I.3	:	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2018	9
I.4	:	Total Jumlah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2016	11
I.5	:	Total Jumlah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2017	12
I.6	:	Total Jumlah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2018	13
I.7	:	Total Jumlah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Usia 17 Tahun, Dikota Pekanbaru.	14
II.1	:	Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	36
II.2	:	Operasionalisasi Variabel Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru	42
III.1	:	Tabel Informan Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	44
III.2	:	Jadwal Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	50
IV.1	:	Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2013	56
IV.2	:	Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2013	57
IV.3	:	Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru	59

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar			Halaman
II.2	:	Kerangka Pikir penelitian tentang Penelitian Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	39
III.1	:	Tekhnik Analisa Data Menurut Creswell Dalam Meneliti Judul Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	48
IV.1	:	Struktur Organisasi Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru Terkait Penelitian Yang Berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	67
V.1	:	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Yang Dilakukan Polresta Kota Pekanbaru Di Salah Satu Kota Pekanbaru	78
V.2	:	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Polresta Kota Pekanbaru di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru	79
V.3	:	Dokumentasi Kondisi Parkir Kendaraan Diluar Sekolah Yang Dilakukan Siswa/Siswi Untuk Menghindari Larangan Penggunaan Sepeda Motor Di Sekolah Mereka	84
V.4	:	Dokumentasi Kondisi Parkir Kendaraan Diluar Sekolah Yang Dilakukan Siswa/Siswi Untuk Menghindari Larangan Penggunaan Sepeda Motor Di Sekolah Mereka	84
V.5	:	Dokumentasi Polresta Kota Pekanbaru Pada Saat Melakukan Operasi Zebra Muara Takus Pada Bulan Oktober 2019	95
V.6	:	Dokumentasi Bentuk Sosialisasi Sebelum Melakukan Operasi Zebra Muara Takus Pada Bulan Oktober 2019 yang dilaksanakan oleh Polresta Kota Pekanbaru	96

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran			Halaman
1	:	Daftar WawancaraAnggota Kepolisian Republik Indonesia Sektor Pekanbaru Terkait Dengan Penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	120
2	:	Daftar Wawancara Kepala Sekolah Terkait Dengan Penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	126
3	:	Daftar Wawancara Siswa/i SMA Terkait Dengan Penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	131
4	:	Daftar Wawancara Masyarakat Terkait Dengan Penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	134
5	:	Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	137
6	:	Dokumentasi Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terkait dengan judul Penelitian Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	146
7	:	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Terkait Judul Penelitian Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	147
8	:	Surat Balasan dari Satlantas Pekanbaru Terkait Judul Penelitian Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	148

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Retno Palupi
NPM	:	157310350
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas penyataan butir 1dan 2tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,13 Maret 2020
Pelaku Pernyataan,

Retno Palupi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)

ABSTRAK

Oleh
Retno Palupi

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya terkait pelanggaran pengemudi di jalan lalu lintas yang objek penelitian penulis adalah remaja tingkat SMA yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) selain itu permasalahan yang terjadi adalah remaja yang sering ugal-ugalan di jalan, dan tidak menggunakan helm. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berjalan dengan baik khususnya terkait dengan persyaratan mengemudi yang harus dimiliki setiap pengendara sepeda motor belum berjalan "Cukup Baik", hal ini dikarenakan beberapa faktor yang berdampak Kepada si anak, apabila tidakan tegas berupa pelarangan dilakukan, sementara kelengkapan fasilitas transportasi pendukung berupa sarana dan prasarana angkutan umum belum mendukung, maka ditakutkan akan menimbulkan permasalahan baru yang memiliki dampak lebih luas terkait dengan pendidikan si anak tersebut terkait transportasi mereka berangkat kesekolah. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dibawah umur, agar tidak terjadi peningkatakan jumlah kecelakaan setiap harinya.

Kata Kunci : Implementasi, Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Persyaratan, Pengemudi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Implementation Of Law Number 22 Of 2009 Concerning Road Traffic And Transport(Study: Driver Requirements In Pekanbaru City)

ABSTRACT

By
Retno Palupi

The problem raised in this study is the Implementation of Law Number 22 Year 2009 specifically related to violations of drivers on the road traffic which the author's research object is a high school-level teenager who does not have a Driving License (SIM) in addition to the problems that occur are teenagers who often inconsiderate on the road, and don't use a helmet. This study aims to analyze the extent of the Implementation of Law Number 22 Year 2009 Regarding Traffic and Road Transportation (Study: Driver Requirements in Pekanbaru City). In conducting this research, researchers used a type of descriptive survey, with the type of qualitative research, qualitative research are methods to explore and understand the meaning by a number of individuals or groups of people ascribed to social or humanitarian problems. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the implementation of Law Number 22 Year 2009 has not been going well, especially related to the driving requirements that must be had by every motorcycle rider that has not run "Good Enough", this is due to several factors that impact on the child , if the decisive action in the form of a ban is carried out, while the completeness of supporting transportation facilities in the form of public transport facilities and infrastructure does not yet support, it is feared that it will cause new problems that have a wider impact related to the child's education regarding their transportation to go to school. The recommendation that needs to be considered is to increase supervision over the use of underage vehicles, so there is no increase in the number of accidents every day.

Keywords: Implementation, Traffic, Road Transportation, Requirements, Driver

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang, salah satunya dalam perkembangan penduduk yang cepat berpengaruh juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), Kemajuan zaman dalam bidang ilmu iptek tersebut memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang berisat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah, hal ini berpengaruh terhadap pergerseran kebutuhan manusia, misalnya saja, dahulu kebutuhan akan kendaraan termasuk kebutuhan barang mewah, namun sekarang kendaraan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Tujuan pembangunan transportasi darat untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, dimana Kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana yang ada, peningkatan yang signifikan dari jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kendaraan bermotor yang ada tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas, sarana, dan prasana jalan.

Tidak seimbangnya pertambahan jaringan jalanserta fasilitas lalulintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalul intas lainnya.Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit.Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya.

Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan pelanggaran lainnya, dimana didalamnya termasuk kecelakaan yang melibatkan anak dibawah umur, angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, sehingga membuat meningkatnya angka kecelakaan dari tahun ke tahun.

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin. Saat ini, sepeda motor banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang mudah dikendarai dan dipelajari, bila dilihat dari segi bentuk dan ukurannya yang lebih kecil dibandingkan kendaraan bermotor lainnya. Ukuran sepeda motor yang kecil sering dianggap sebagai cara mengatasi masalah oleh para penggunanya. Selain itu untuk memiliki sepeda motor persyaratannya mudah. Hal tersebut yang membuktikan bahwa sepeda motor menjadi salah satu pilihan masyarakat Indonesia sebagai alat transportasi darat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Salim (2000:56) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan.Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas.Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu. Hal ini tidak di imbangi dengan kesadaran, yang mana dilapangan ditemukan bahwa masyarakat dengan bebas memberikan fasilitas kepada anak mereka meskipun belum layak untuk mendapatkan kebasan berkendara karna belum mencukupi umur.

Perkembangan saat ini, memberikan fakta dilapangan bahwa anak dibawah umur menjadi hal yang biasa di temui di jalan raya dengan mengendarai sepeda motor, remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, fase ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan masa dimana remaja mengalami ketidak stabilan emosi dan perasaan, pada fase ini mereka cenderung untuk mencoba hal-hal yang baru. sehingga perlu diawasi dan diberikan perhatian oleh orang tua, guru dan masyarakat agar terhindar dari hal-hal negative, dari sifat rasa ingin tahu dan ajakan teman, memungkinkan para remaja untuk mencoba hal-hal baru seperti mengendarai sepeda motor. namun, tidak jarang orang tua mendukung anak mereka untuk menggunakan sepeda motor dengan alasan efisiensi, padahal dengan kepenggunaan sepeda motor oleh anak yang masih di bawah umur adalah sebuah bentuk pelanggaran bila dilihat dari UU. No. 22 tahun 2009 Pasal 81 ayat 2a yaitu:

1. Untuk Mendapatkan Surat Izin Mengemudi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 77, Setiap Orang Harus Memenuhi Persyaratan Usia, Adminsitratif, Kesehatan Dan Lulus Uji.
2. Syarat Usia Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Ditentukan Paling Rendah Sebagai Berikut:
    a. Usia 17 Tahun Untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, Surat Izin Mengemudi D.
    b. Usia 20 Tahun Untuk Surat Izin Mengemudi B I, dan
    c. Usia 21 Tahun Untuk Surat Izin Mengemudi B II..
3. Syarat Aministratif Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Meliputi:
    a. Identitas Diri Berupa Kartu Tanda Penduduk
    b. Pengisian Formulir Permohonan
    c. Rumusan Sidik Jari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Syarat Kesehatan Sebagaimana Yang Dimaksud Pada Ayat (1) Meliputi:
    a. Sehat Jasmani Dengan Surat Keterangan Dokter, Dan
    b. Sehat Rohani Dengan Surat Lulus Tes Psikologis
5. Syarat Lulus Ujian Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Meliputi:
    a. Ujian Teori
    b. Ujian Praktik
    c. Ujian Keterampilan Melalui Simulator
6. Selain Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Dan Ayat (5) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Akan Mengajukan Permohonan:
    a. Surat Izin Mengemudi B I Harus Memiliki Surat Izin Mengemudi A Sekurang-Kurangnya 12 (Dua Belas) Bulan.
    b. Surat Izin Mengemudi B II Harus Memiliki Surat Izin Mengemudi B I Sekurang-Kurangnya 12 (Dua Belas) Bulan.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang di atas bahwa Pengemudi berhak mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) apabila sudah mencukupi umur minimal 17 tahun, hal ini dikarnakan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan SIM ini adalah dengan melengkapi persyaratan administrasi yaitu Identitas Diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dengan adanya peraturan tentang syarat Pengemudi, maka diharapkan tidak ada lagi pelanggaran dalam berlalu lintas. Dalam penelitian ini berfokus pada para remaja yang sering melakukan pelanggaran seperti mengemudikan sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan tinggi, tidak memakai helm, tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyalakan lampu utama, memutar arah sembarangan, tidak ada spion pada motor, membonceng lebih dari satu orang, menggunakan telepon genggam saat berkendara, hingga berjalan silang pada saat mengemudikan sepeda motor. Tidak jarang, para remaja tersebut mengalami kecelakaan pada saat mengendarai sepeda motor.

Pada dasarnya anak merupakan tunas bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus kehidupan manusia sehingga menjadi kewajiban kita untuk mengantarkan mereka agar mampu mengembangkan kepribadian, menentukan identitas dirinya yang sesuai dengan pertumbuhan usianya, generasi muda seharusnya mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa, seiring dengan perkembangan zaman banyak generasi yang memiliki keahlian diberbagai bidang, namun sebaliknya banyak juga yang cenderung melakukan penyimpangan sosial, maraknya Pengendara motor di bawah umur yang tidak sesuai dengan Undang- Undang Kepolisian Pasal 81 tentang syarat umur pengendara motor usia 17 tahun untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi.

Masa remaja atau di bawah umur yang sekiranya dikatakan dalam pertumbuhannya masih belum seimbang karena masih membutuhkan arahan dari orang tua dalam tindakannya dan suka meniru perilaku orang lain tanpa melihat baik buruknya. Tidakan tersebut merupakan perkembangan dalam kepribadian seorang remaja, beberapa faktor penyebab terjadinya kenakalan sangat komplek misalkan, pengaruh teman, lingkungan dan lain-lain, adapun dua faktor yang saling berkaitan yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar, faktor yang pertama, faktor dari dalam yang dapat menyebabkan kenakalan adalah kurangnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penampung emosional, lemahnya kemampuan dalam mengendalikan dorongan-dorongan dalam pergaulan atau interaksi dan kurangnya pembangunan hati nurani ataupun iman, sedangkan faktor yang kedua, faktor dari luar itu merupakan adanya pengaruh budaya-budaya dari negara lain atau luar yang kurang dipahami oleh masyarakat dengan adanya filter untuk menerima yang baik dan menjauhi yang kurang baik.

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara motor di bawah umur, keterlibatan pelajar atau siswa Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Keatas sebagai pengendara motor di bawah umur yaitu pengendara motor yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 pasal 81 ayat 2, bahwa seseorang berhak memiliki SIM C pada usia 17 tahun, sedangkan, siswa SMP merupakan remaja awal yang rentang usianya 12 sampai 15 tahun dan SMA masing memiliki rentan usia 15 – 18 Tahun, oleh karena itu, siswa SMP dan SMA semestinya belum berhak mengendarai kendaraan bermotor dan belum berhak memiliki Surat Izin Mengemudi, namun kenyataannya, banyak siswa SMP yang mengendarai kendaraan bermotor, hal ini jelas melanggar hukum.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, Resort Kota Pekanbaru, Jumlah Kecelakaan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2016.

No	Bulan	Jumlah Laka	Jumlah Korban Lantas			Ket
			MD	LB	LR	
1	Januari	19	10	8	8	-
2	Februari	15	6	4	15	-
3	Maret	13	5	4	9	-
4	April	19	6	8	12	-
5	Mei	14	2	5	13	-
6	Juni	21	5	-	13	-
7	Juli	19	4	2	17	-
8	Agustus	19	9	2	15	-
9	September	19	13	1	11	-
10	Oktober	20	7	2	20	-
11	November	22	15	2	21	-
12	Desember	12	9	2	7	-
Jumlah		**212**	**91**	**40**	**178**	**-**

Sumber: *Kantor Polresta Kota pekanbaru, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 1.1 yaitu tentang jumlah kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polresta Kota Pekanbaru pada tahun 2016 bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas berjumlah 212, yang dapat dijabarkan bahwa yang meninggal dunia (MD) bejrumlah 91 orang, luka berat (LB) berjumlah 40 orang, dan luka ringan (LR)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berjumlah 178. Jadi yang paling banyak jumlah kecelakaan lalu lintas adalah dalam kategori luka ringan.

Tabel 1.2 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2017.

No	Bulan	Jumlah Laka	Jumlah Korban Lantas			Ket
			MD	LB	LR	
1	Januari	21	14	5	15	-
2	Februari	11	6	6	8	-
3	Maret	17	8	6	7	-
4	April	29	12	12	18	-
5	Mei	19	10	2	35	-
6	Juni	16	4	5	14	-
7	Juli	10	6	5	6	-
8	Agustus	16	12	12	6	-
9	September	10	5	8	10	-
10	Oktober	17	10	10	14	-
11	November	13	8	4	14	-
12	Desember	12	7	3	11	-
Jumlah		**191**	**102**	**78**	**158**	**-**

Sumber: *Kantor Polresta Kota pekanbaru, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 1.2 yaitu tentang jumlah kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polresta Kota Pekanbaru pada tahun 2017 bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas berjumlah 191, yang dapat dijabarkan bahwa yang meninggal dunia (MD)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bejrumlah 102 orang, luka berat (LB) berjumlah 78 orang, dan luka ringan (LR) berjumlah 158. Jadi yang paling banyak jumlah kecelakaan lalu lintas adalah dalam kategori luka ringan, tetapi korban meninggal dunia dan luka berat jumlahnya meningkat dari tahun 2016.

Tabel 1.3 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2018.

No	Bulan	Jumlah Laka	Jumlah Korban Lantas			Ket
			MD	LB	LR	
1	Januari	13	9	4	23	-
2	Februari	11	6	2	14	-
3	Maret	23	7	11	37	-
4	April	20	9	3	3	-
5	Mei	14	9	9	24	-
6	Juni	13	6	4	13	-
7	Juli	18	10	6	19	-
8	Agustus	14	4	4	38	-
9	September	17	6	10	33	-
10	Oktober	22	3	14	19	-
11	November	16	6	3	31	-
12	Desember	15	8	2	38	-
Jumlah		**196**	**83**	**72**	**292**	**-**

Sumber: *Kantor Polresta Kota pekanbaru, Tahun 2019*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel 1.3 yaitu tentang jumlah kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polresta Kota Pekanbaru pada tahun 2018 bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas berjumlah 196, yang dapat dijabarkan bahwa yang meninggal dunia (MD) bejrumlah 83 orang, luka berat (LB) berjumlah 72 orang, dan luka ringan (LR) berjumlah 292. Jadi yang paling banyak jumlah kecelakaan lalu lintas adalah dalam kategori luka ringan semakin meningkat dari tahun 2017.Hal ini menggambarkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas jumlahnya selalu meningkat.

Dari penjelasan data pada tabel diatas, diketahui jumlah Kecelakaan yang terjadi di pada masing-masing bulan yang melibatkan pengguna jalan yang dari tahun 2016 hingga Tahun 2018 memiliki jumlah yang besar dan semakin meningkat, data diatas belum termasuk data jumlah keseluruhuhan yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran yang di maksud adalah pengguna kendaraan tidak memiliki surat-srurat yang lengkap seperti SIM, STNK, dll, selain itu pelanggaran yang paling sering di lakukan oleh pengendara adalah tidak menggunakan helm, tidak ada kaca spion, dan melanggar lampu merah. Dengan demikian, untuk data secara keseluruhan yang melanggar peraturan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.4 Total Jumlah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2016.

No	Bulan	Jumlah GAR	Golongan Usia			
			17	**17-27**	**28-50**	**➢ 51**
1	April	1877	80	571	715	511
2	Mei	4150	87	1874	1868	321
3	Juni	1117	24	421	565	107
4	Juli	1076	31	412	538	95
5	Agustus	1358	26	458	776	98
6	September	1187	35	500	605	47
7	Oktober	840	44	333	412	51
8	November	2123	73	545	1405	100
9	Desember	600	25	200	358	17
Jumlah		**14.328**	**425**	**5.314**	**7.242**	**1.347**

Sumber: *Kantor Polresta Kota pekanbaru, Tahun 2019*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2016 adalah 14.328 orang. Dari total 14.328 orang yang melakukan pelanggaran terdapat 425 orang yang berkategori usia 17 tahun, selainjutnya kategori usia 17-27 berjumlah 5.314 orang, selain itu yang memiliki kategori usia 28-50 berjumlah 7.242 orang, dan masyarakat yang berada kategori usia >50 berjumlah 1.347 orang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.5 Total Jumlah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2017.

No	Bulan	Jumlah GAR	Golongan Usia			
			17	17-27	28-50	➢ 51
1	Januari	1079	40	320	655	64
2	Februari	980	32	405	517	26
3	Maret	728	55	300	339	34
4	April	1856	65	787	837	167
5	Mei	3780	108	1636	1845	191
6	Juni	1980	80	574	815	511
7	Juli	2455	56	987	1274	138
8	Agustus	3010	72	1066	1724	148
9	September	3010	72	1066	1724	148
10	Oktober	3239	110	1226	1795	108
11	November	3825	95	1697	1888	145
12	Desember	1920	83	904	876	57
Jumlah		**27.643**	**883**	**10.883**	**14.158**	**1.719**

Sumber: *Kantor Polresta Kota pekanbaru, Tahun 2019*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2017 adalah 27.643 orang. Dari total 27.643 orang yang melakukan pelanggaran terdapat 883 orang yang berkategori usia 17 tahun, selainjutnya kategori usia 17-27 berjumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10.883 orang, selain itu yang memiliki kategori usia 28-50 berjumlah 14.158 orang, dan masyarakat yang berada kategori usia >50 berjumlah 1.719 orang.

Tabel 1.6 Total Jumlah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Yang Ditangani Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2018.

No	Bulan	Jumlah GAR	Golongan Usia			
			17	17-27	28-50	➢ 51
1	Januari	1137	64	477	545	51
2	Februari	1622	83	695	791	53
3	Maret	387	36	122	219	10
4	April	2432	77	837	1335	183
5	Mei	1340	41	352	849	98
6	Juni	527	12	171	319	25
7	Juli	2152	65	943	1011	133
8	Agustus	2312	56	824	1303	129
9	September	2288	73	772	1297	146
10	Oktober	2302	55	988	1146	113
11	November	2839	60	1031	1607	141
12	Desember	1893	65	792	941	95
Jumlah		**21.231**	**687**	**8.004**	**11.363**	**1.177**

Sumber: *Kantor Polresta Kota pekanbaru, Tahun 2019*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2018 adalah 21.231 orang. Dari total 21.231 orang yang melakukan pelanggaran terdapat 687 orang yang berkategori usia 17 tahun, selainjutnya kategori usia 17-27 berjumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8.004 orang, selain itu yang memiliki kategori usia 28-50 berjumlah 11.363 orang, dan masyarakat yang berada kategori usia >50 berjumlah 1.177 orang.

Sementara itu, untuk mengetahui secara rinci terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah usia 17 tahun, maka penulis akan menyajikan datanya pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.7 Total Jumlah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Usia 17 Tahun, Dikota Pekanbaru.

No	Tahun	Total Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah Usia 17 Tahun	Keterangan
1	2016	108	Kecelakaan
2	2017	204	Kecelakaan
3	2018	371	Kecelakaan
Total Jumlah : 683 Kasus			

Sumber: *Kantor Polresta Kota pekanbaru, Tahun 2019*

Berdasarka data tabel 1.7 di atas, dapat dilihat bahwa kecelakaan yang melibatkan anak dibawah umur mengalami peningkatan di tiap tahunnya, dan juga dimana jumlah tersebut sangat besar untuk jumlah anak dibawah umur, hal ini menjadi perhatian khusus bagi pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang tentunya harus melakukan upaya bagaimana caranya agar angka kecelakaan tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Banyak faktor yang mengakibatkan para remaja yang masih di bawah umur menggunakan sepeda motor, salah satunya faktor lingkungan seperti sekolah dan orang tua, sekolah sebagai sarana pendidikan seharusnya mencegah agar siswanya yang masih di bawah umur untuk tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah, namun pada kenyataanya, beberapa sekolah di kota Pekanbaru justru mengizinkan para siswanya untuk menggunakan sepeda motor ke sekolah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yang menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan dari aturan di jalan raya tentunya adalah pihak kepolisian, dimana dalam hal ini diberikan wewenang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Pekanbaru, bagian Satlantas Kota Pekanbaru.untuk mengetahui rangkaian Tugas Pokok dari Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

1. Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru adalah unsure pelaksana utama polresta yang berada di bawah Kapolresta.
2. Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru bertugas menyelenggarakan / membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi:
   a. Penjagaan;
   b. Pengaturan;
   c. Pengawalan;
   d. Patroli;
   e. Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas Jalan;
   f. Rekayasa Lalu Lintas;
   g. Registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor;
   h. Penyidikan kecelakaan lalu lintas;
   i. Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3. Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru di pimpin oleh Kepala Sat Lantas yang disingkat Kasat Lantas, bertanggung jawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polresta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan beberapa fenomena yang mana sekolah-sekolah di penuhi oleh kendaraan siswa dan siswi, dimana dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada sekolahSMA 2 Pekanbaru, SMK 2 Muahammadiyah Pekanbaru, SMA PGRI Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan penulis melihat siswa-siswi ke tiga sekolah tersebut banyak menggunakan sepeda motor dan tidak menggunakan helm, pelanggaran yang paling mendasar bahwa tentunya mereka belum memilki Surat Izin Mengemudi (SIM) walaupun alasan mereka meggunakan sepeda motor agar siswa tidak terlambat untuk masuk sekolah dan dapat menghemat beban biaya transportasi para siswa, terutama bagi siswa yang lokasi rumah cukup jauh dengan lokasi sekolah, tetapi tetap saja mereka melanggar peraturan lalu lintas. Disisi lain, tidak hanya sekolah yang mengizinkan para siswanya yang masih di bawah umur untuk menggunakan sepeda motor, beberapa orang tua siswa-siswa ini mengizinkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menggunakan sepeda motor, orang tua menggunakan kesempatan ini untuk memudahkan aktifitasnya seperti, menyuruh anak berbelanja, mengantarkan barang atau mengantarkan orang tua ke tempat kerja, hingga memberikan fasilitas anak sepeda motor untuk keseharian mereka.

Dengan demikian,berdasarkan gambaran umum pada latar belakang masalah di atas maka penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena masalah yang didasari dari data awal yang penulis dapatkan dari berbagai sumber yang mana salah satunya adalah surat kabar media online di Kota Pekanbaru yang memperkuat dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. dan fenomena yang penulis temukan adalah :

1. Masih kurang optimalnya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tepatnya Pasal 77 tentang Persyaratan Pengemudi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. maka seharusnya para pelajar Menengah Pertama hingga Pelajar Menengah Ke atas belum seharusnya mengendarai sepeda motor, terutama digunakan sebagai alat transportasi mereka menuju ke sekolah, hal ini dikarenakan usia yang belum mencukupi untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi.

2. Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan, penulis menduga bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru belum berjalan secara baik, hal ini didasari dari fakta dilapangan yang memperlihatkan bahwa siswa-siswi yang menggunakan sepeda motor untuk kendaraan mereka sehari-hari.
3. Berdasarkan pra observasi penulis kurangnya peran dari pihak sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap siswa-siswinya yang menggunakan kendaraan sepeda motor pada saat pergi sekolah. Hal ini tentunya mengakibatkan siswa-siswi secara bebas dalam menggunakan sepeda motor dengan tidak memilki SIM dan melanggar peraturan lainnya.

Sehubungan dengan permasalahan di atas dan juga didukung dengan fakta yang terjadi dilapangan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian yang berjudul:**"Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)"**.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dan juga berdasarkan penjelasan penulis di atas yang didukung dengan hasil observasi dan pemberitaan dimedia-media berita di Kota Pekanbaru, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: "Bagimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)".

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a. Bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)".
   b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak Terait dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)".
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a. Secara Teoritirs.

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang bersifat akademis dan menjadi sumbangsih pemikiran bagi pihak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lain yang nantinya akan melakukan penelitian serupa di waktu mendatang khususnya yang berkaitan tentang Implementasi Undang-Undang Noomor 22 Tahun 2009

b. Secara Praktis

Memberikan berupa bahan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan peraturan tentang lalu lintas, dimana salah satunya adalah Pihak Kepolisian Kota Pekanbaru dan juga Peran Pihak Sekolah yang seharusnya melarang siswa nya untuk menggunakan Sepeda Motor Kesekolah.

c. Secara Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan khususnya di Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, "Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (Studi: Larangan Membawa Kendaraan Bermotor Ke Sekolah)". Berikut ini dikemukakan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:23), Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (*legislative*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaffar (dalam Ndraha 2012;16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhbungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan anatara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha 2011:7).

Menurut Polje (dalam Syafiie 2011:9) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinasumum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie 2011:9) Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Ndraha (2003:6) Ilmu pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melakukan hubungan pemerintahan,sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Menurut Rasyid (dalam Rahyunir dan Munaf, 2015;28) apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga Negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yakni hirarki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*).

Kepemerintahan yang baik (*good government*) menurut Widodo (dalam Rahyunir dan Munaf, 2015:32) menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam masyarakat,segera diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara baik dan benar, karena kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi dari masyarakat yang dilayaninya.

Menurut Strong (dalam Syafiie, 2011;9) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Barnard (dalam Syafiie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistempemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.Pemerintahan dalam ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Gulick (dalam Syafiie 2011:12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

3. Konsep Manajemen

Menurut Sitorus (2009;6) proses megelola sumber daya dan dana sistematik, dengan mengoptimalkan fungsi organic manajemen sehingga memberikan manfaat atau nilai bagi umat manusia.

> George R. Terry (1977:4) mengemukakan pandangannya manajemen adalah sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan tindakan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendeterminasi dan mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lain.

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut George R. Terry (dalam Alamsyah, 2011:4) disingkat dengan POAC.

a. *Planning* (Perencanaan)
   Yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
b. *Organizing* (Pengorganisasian)
   Yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
c. *Actuating* (Penggerakan)
   Yaitu sebagai cara untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. *Controlling* (Pengawasan)
   Yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa digunakan secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana yang sudah ditentukan dari awal.

Agar fungsi manajemen di atas dapat berjalan sesuai yang diharapkan tentu saja harus tersedia sarana yang memadai, yang dikenal dengan istilah 6M yaitu "*Men* (Manusia), *Material* (Bahan), *Machines* (Mesin), *Methods* (Metode), *Money* (Uang), *Market* (Pasar)" Terry (dalam sitorus, 2011; 8-9).

Manajemen secara pengertian dan juga berdasarkan analisa dari seorang ahli adalah sebagaimana dikemukakan oleh Mary Parker Follet (1997:95) yang mengatakan bahwa amanjemen adalah "*management is the art of getting things done through people*" maksudnya manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.

> Siagian (2005:5) mendefinisikan manajemen dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggara berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan menejerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen secara umum merupakan proses pencapaian tujuan melalui dinamika kerjasama antara manusia atau melalui kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh orang lain. Manajemen juga merupakan alat bagi administrasi atau alat bagi seorang manajer dalam organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

> Winardi (dalam sitorus, 2011:2) mengemukakan manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan tindakan pengawasan, yang dilaksanakan untuk mendeterminasi dan mencapai sasaran-sasaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsure manusia dan sumber daya lainnya.

Dari pendapat para ahli yang penulis kemukakan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang untuk menjalankan suatu organisasi dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut agar dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.Menurut Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoriative allocation ofvalues for whole* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan menurut Nugroho (2008: 58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Selanjutnya Dunn mengartikan kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilian-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003:132)."

Menurut David Easton (dalam Anggara: 2014:35) kebijakan Publik adalah mengalokasikan nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Menurut Dye (dalam Indiahono: 2009: 17) kebijakan haruslah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Dye (dalam Islamy, 2000:19) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama. Dalam arti ini, maka kebijakan publik adalah: usaha untuk memahmi dan memberi arti tentang apa yang:

1. Dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah
2. Menyebabkan atau apa yang mempengaruhinya
3. Menjaga dampak dari kebijakan publik tersebut

Selanjutnya Easton (dalam Agustino, 2006:19) memberikan definisi kebijakan publik "the autorative allocation of values for the whole society". Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah secara sah dapat berbut sesuatu pada masyarakatnya dan piihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan oleh pemerintah termasuk para penguasa dalam politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dakam suatu masalah tertentu dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu.

Berdasarkan pendapat berbagai para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.Kebijakan untuk melakukan sesuatu tertuang biasanya tertuang dalam-dalam ketentuan atau peraturan perundang-udangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sebagai sifat yang memikat dan memaksa.

Kemudian menurut Youg dan Quinn (dalam Suharto, 2005: 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang , kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangann hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tuggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakuakan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah tiada dan karenanya tidak memerlukan.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa di buat beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

5. Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Usman, 2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mazmanian dan Sebatier (dalam Wahab, 2008:68) merumuskan proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut: "implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan).

Menurut Edward (dalam Widodo, 2011:96-110) ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi.Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition,* dan *bureucratic structure*.

1. **Komunikasi (*Communication*)**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*).Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait yang berkitan dengan segala aspek tentang pelaksanaan kebijakan yang di realisasikan.

2. Sumber Daya *(Resources)*

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia (*Staff*)
   Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b) Anggaran (*Budgetary*)
   Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas (*facility*)
   fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)
   Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. **Disposisi (*Disposition*)**

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. **Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Konsep Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transpotasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa trnasportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturanperaturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitan terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Dan untuk melihat penelitian terdahulu dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel di bawah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Pasal 81 Ayat 2 Tentang Syarat Mendapatkan Izin Mengemudi).

Nama Peneletian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	4	5
Lilik Purwastuti Dan Anis Bafadhal, Nys. Arfa Penelitian dilakukan pada tahun 2013	Meningkatkan Pemahaman Pelajar Terhadap Undang-Udang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi.	Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah sama meneliti tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak paa lokasi penelitian, waktu, universitas, dan juga teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, dimana penulis menggunakan teori Edward III (dalam Widodo, 2011:96-110) sebagai dasar untuk penelitian sementara penelitian terdahulu menggunakan teori dari Siagian (2008:77)
Abiantoror Gautama Adhi Penelitian dilakukan pada tahun 2016	Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Kendaraan Bermotor (Studi: Kasus Dipolresta Karanganyar)	Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah sama meneliti tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu selain terletak pada lokasi penelitian, waktu, universitas, dan juga teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian yang digunakan dimana penulis menggunakan tekhnik kualitatif dari teori Creswell (2016: 4). Sementara penelitian terdahulu menggunaka jenis penelitian kuantitatif yang diambil dari teori sugiono (2014)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama Peneletian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	**2**	**4**	**5**
R.A Ekie Prifitriani Ramona Penelitian dilakukan pada tahun 2014	Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros	Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah sama meneliti tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jadi perbedaan penelitian penulis dengan peneltiian terdahulu adalah tempat penelitian, yaitu penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu di Kabupaten Maros, selain itu penelitian juga terletak pada waktu penelitian, serta teori yang digunakan, adapun teori yang penulis gunakan adalah Edward III (dalam Widodo, 2011:96-110), sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori Barnard dalam Prawirosentono (2008:27)
Ferawati Royani Vol. 2, No. 2 Tahun 2017 Penelitian dilakukan pada tahun 2017	Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya	Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah sama meneliti tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu selain terletak pada lokasi penelitian, waktu, universitas, dan juga teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian yang digunakan dimana penulis menggunakan tekhnik kualitatif dari teori Creswell (2016: 4).Sementara penelitian terdahulu menggunaka jenis penelitian kuantitatif yang diambil dari teori sugiono (2014)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama Peneletian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	**2**	**4**	**5**
Muhammad Iqbal Julian, e-Juornal Administrative Reform, Vol. 4, No. 3 Penelitian dilakukan pada tahun 2016	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Pembinaan Anggota Club Beat Borneo Community Di Kota Samarinda	Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah sama meneliti tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak paa lokasi penelitian, waktu, universitas, dan juga teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, dimana penulis menggunakan teori Edward III (dalam Widodo, 2011:96-110) sebagai dasar untuk penelitian sementara penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang noomor 22 Tahun 2009.

Sumber: Olahan Data Penulis, 2019

Jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat ada beberapa skripsi dan jurnal yang dijadikan panduan penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun persamaan dari penelitan penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah ada pada waktu, dan tempat penelitian.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang penulis paparkan terkait penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (Studi: Larangan Membawa Kendaraan Bermotor Ke Sekolah dengan menggunakan teori Edward dalam Widodo, 2011: 96-110) untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar II.I :Kerangka Pikir Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)



Sumber : Edward (dalam Widodo, 2011:96-110)

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita.Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta caar formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilian-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.
4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
5. Indikator dari Variabel Pelaksanaan adalah:
    1. Komunikasi (*Communication*)

       Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijkan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan yang menjadi sasaran (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Sumber Daya (*Resources*)

   Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Disposisi (*Disposition*)

   Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam kebijakan, apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dan apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Strukture*)

   Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	**2**	**3**	**4**
Kebijakan Publik Merupakan Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Badan-Badan Dan Atau Aparat Pemerintah. Subarsono (2005: 2)	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi (*Communication*)	a. Sosialisasi Terkait UU Nomor 22 Tahun 2009 terkait larangan membawa motor ke Sekolah. b. Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Sekolah-Sekolah yang ada di Kota Pekanbaru terkait Aturuan yang berlaku.
		2. Sumber Daya (*Resources*)	a. Memiliki SDM (Personil Satlantas) yang mencukupi dan profesional dalam melaksanakan kebijakan lalu lintas jalan. b. Tersedia Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam upaya Pelaksanaan Kebijakan.
		3. Disposisi (*Disposition*)	a. Pemahaman dan Pengetahuan SDM sebagai pelaksana kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 b. Pelaksanaan Pengawasan untuk memastikan Siswa/Siswi tidak menggunakan kendaaraan khususnya pada jam sekolah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		4. Struktur Birokrasi.(*Bur eucratic Strukture*)	a. Memiliki Standar Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan terkait Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 b. Pemberian Sanksi Kepada Sekolah-Sekolah yang tidak memberikan ketegasan dalam kepada Siswa/Siswi nya untuk tidak menggunakan kendaraan.

Sumber : Edward dalam Widodo, 2011:96-11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Creswell (2016: 4). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentangImplementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru).

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini khususnya di Sekolah-Sekolah Kota Pekanbaru.
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Satlantas Polresta Kota Pekanbaru, yang bertujuan untuk mencari informasi dan ke absahan data terkait dengan data-data yang diperlukan dalam melengkapi Usulan Penelitian Penulis.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait terkait dengan larangan lalu lintas dalam membawa kendaraan ke sekolah karena tentunya jika masih dalam sekolah siswa/i belum memiliki SIM dan harus masih dalam control orang tua dan juga pihak sekolah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Informan Penelitian

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107).Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.*Key informan* atau disebut dengan *informan* utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Dan untuk melihat informan di dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan penjelasan seperti dibawah ini:

Tabel III.1 : Jumlah Informan Penelitian Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

No	Subjek	Jabatan Subjek	Informan
1	**2**	**3**	**4**
1	IPDA Ratna Wilis	Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru	1
2	IPDA Hendri B	Kasubnit 2 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru	1
3	Drs. Kasim	Kepsek SMA 2 Pekanbaru	1
4	Akmal M.Ag	Wakil Kepsek SMK 2 Muhammadiyah Pekanbaru	1
5	Elpisno, S.Pd	Kepsek SMA PGRI Pekanbaru	1
6	Sesuai Data Lapangan	Perwakilan Siswa & Siswi	9
7	Sesuai Data Lapangan	Masyarakat Pengguna Jalan Raya	5
Jumlah			**19**

Sumber : Olahan Penulis tahun 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

   Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap *informan* sebagai sumber data penelitian.Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini*Informan* penelitian yaitu Kasat Lantas Polsek Kota Pekanbaru, Kaur Tilang Polsek Kota Pekanbaru, Kepala Sekolah SMA 2 Pekanbaru, Kepala Sekolah SMK 2 Muhammadiyah Pekanbaru, Kepala Sekolah SMA PGRI Pekanbaru, dan Masyarakat sebagai pengguna jalan.

2. Data Sekunder

   Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada kantor Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru,adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

   a. Sejarah singkat dari Kepolisian Kota Pekanbaru.
   b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
   c. Struktur Organisasi Dari Kantor Kepolisian atau Polsek yang dijadkan lokasi Penelitian.
   d. Salinan Data terkait dengan profil informan penelitian yang akan penulis lakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh.Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-faceinterview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

umum tidak tersetruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.
2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.
4) Melangsungkan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

c. Dokumentasi

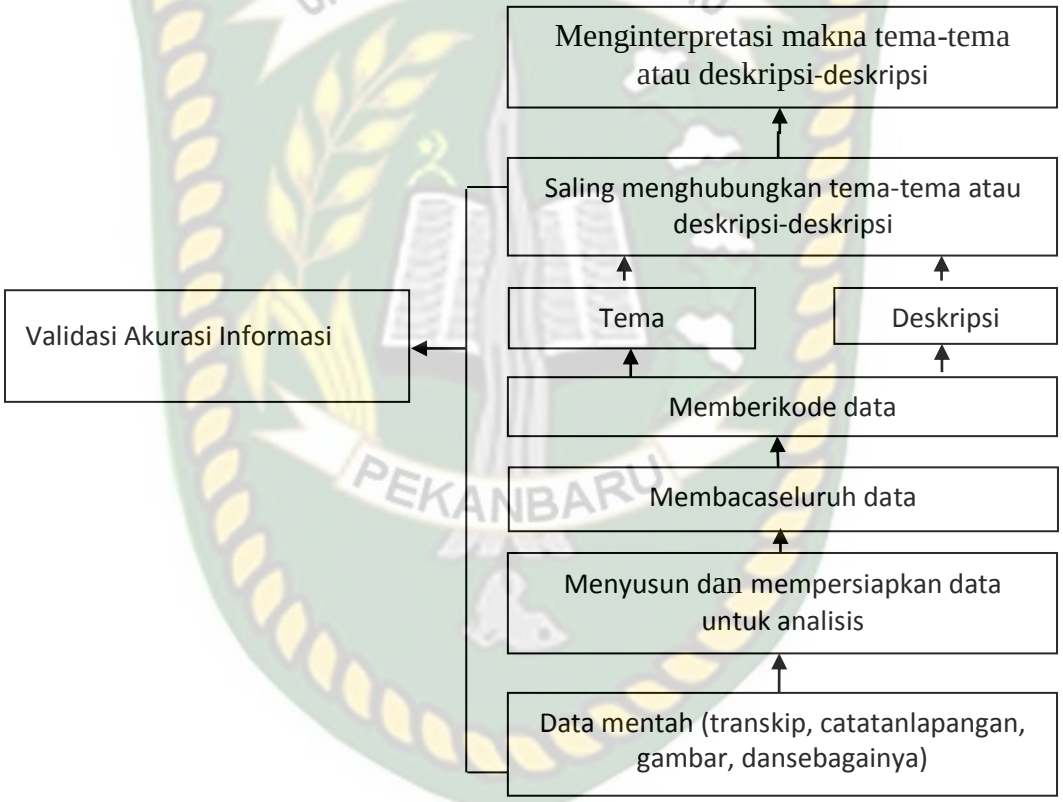
Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016:263), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

Gambar III.1 Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell

Gambar III.1 diatas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan. Gambar III.1 diatas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scaning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau infomasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kaimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam katergori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.

5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Mei				Juni				Juli				Agustus				Septembe				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Ujian Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisioner																								
5	Rekomendasi survay																								
6	Survay Lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil																								

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Penelitian.																							
9	Konsultasi Revisi Skripsi																							
10	Ujian Konferehensif Skripsi																							
11	Revisi Skripsi																							
12	Pengandaan Skripsi																							

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km2 dan secara astronomis terletak di antara 0° 25’ - 0° 45’ Lintang Utara dan 101° 14’ – 101° 34’ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 $km^{2.}$ Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan.Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km2 yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km2 dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km2.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajatcelcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya.Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
Jumlah		458.059	446.020	887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2018

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
Jumlah		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2018

Sebagin besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya.Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima.Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat.Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	**2**	**3**	
1.	Kecamatan Tampan	Simpang baru Sidomulyo barat	Tuah karya Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	Labuh Baru Timur Tampan/	Air hitam Labuh baru barat
3.	Kecamatan Bukit Raya	Simpang tiga Tangkerang Selatan	Tangkerang Utara Tangkerang Labuai
1	**2**	**3**	
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah Tangkerang Barat	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo
5.	Kecamatan Tenayan Raya	Kulim Tangkerang Timur	Rejosari Sail
6.	Kecamatan Sail	Cita Raja Suka Maju Suka Mulia	
7.	Kecamatan Lima Puluh	Rintis Sekip	Tanjung Rhu Pesisir
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	Simpang empat Sumahilang Tanah Datar	Kota Baru Suka Ramai Kota Tinggi
9.	Kecamatan Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kampung dalam Kampung Bandar Kampung Baru
10.	Kecamatan Sukajadi	Jatirejo Kampung tengah Kampung melayu	Kendungsari Harjosari Sukajadi Pulau koran
11.	Kecamatan Rumbai	Limbunsari Muara fajar	Rumbai bukit Palas Sri meranti
12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pandek Limbungan Lembah sari	Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Profil Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km2 atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.39 Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Waka Polresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, dan optimalisasi pencapaian sasaran fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kepentingan pelaksanan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah hukum kepolisian berbeda dari wilayah administrasi Pemerintahan Daerah. Adapun instansi kepolisian yang berada dibawah naungan Polres Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Polsek Kota Pekanbaru
2. Polsek Senapelan
3. Polsek Tampan
4. Polsek Bukit Raya
5. Polsek Sukajadi
6. Polsek Payung Sekaki
7. Polsek Lima Puluh Kota
8. Polsek Rumbai
9. Polsek Rumbai Pesisir
10. Polsek Tenayan Raya

C. Visi dan Misi Polresta Pekanbaru

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang diterima. Pernyataan visi Polresta adalah :"Terwujudnya kemitraan antara polresta pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertibaan masyarakat di wilayah hukum polresta pekanbaru."

Sedangkan Misi dari Polresta Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana lingkunan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan Meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara professional dan porposional.
3. Mengelola professionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanana, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui perpolisian masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
5. Mengembangkan community policing dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing-masing.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preentif, dan Preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kantibmas.
8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku.
9. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak azazi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
10. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudukan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
11. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.

D. Tujuan, dan Sasaran Polresta Pekanbaru

1. Tujuan Polresta Pekanbaru

a. Tercapainya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap PolrestaPekanbaru dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan Polresta Pekanbaru.
b. Terbangunnya kemitraan (partnership) dengan berbagai institusi /lembaga baik dalam maupun luar negeri yang terkait dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

fungsikepolisian dalam menegakkan hukum, ketertiban dan menciptakanrasa aman.

c. Terbangunnya kemitraan dengan masyarakat sebagai implementasi dari perpolisian masyarakat dengan membangun kelembagaan yang didatangi bersama antara masyarakat dengan kepolisian terdepan (Babinkamtibmas) dalam menegakkan hukum, ketertiban dan menciptakan rasa aman. Tergelarnya operasionalisasi Polresta Pekanbaru baik preemtif maupun preventif melalui pemantapan pelaksanaan polmas dan keberadaan polisi di tengah tengah masyarakat.

d. Terkendalinya trend perkembangan kejahatan, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat yang mencakup 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitukejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara danyang berimplikasi kontijensi dengan sasaran :

   1. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional terutama narkoba, perdagangan manusia dan terorisme.
   2. Menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di lautterutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaraninternasional.
   3. Tertangkapnya pelaku utama lainnya dalam kasus, jaringan utamapencucian uang serta membaiknya praktek penegakan hukumdalam mengelola sumber daya kehutanan dalam memberantasillegal logging dan illegal trading.

e. Terwujudnya *good govermance* dalam lembaga Kepolisian denganmemperdayaan komisi kepolisian nasional yang independen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Terwujudnya restrukturasi organisasi Polri sebagai Mabes kecil, Poldacukup, Polres besar dan Polsek kuat.

g. Terpeliharanya aset-aset polri yang masuk dalam SABMIN baikberupa tanah dan bangunan maupun logistik lainnya.

2. Sasaran Prioritas Polresta Pekanbaru

a. Menanggapi dan menindak lanjuti semua pengaduan dan lapora nmasyarakat baik yang disampaikan mulai dari Polsek sampai dengan Polresta.

b. Terwujudnya kemitraan dengan Polresta Pekanbaru dengan penyelenggaraan keamanan lainnya baik antara departemen pemerintah maupun dengan kepolisian negara lain.

c. Tertanganinya konvensional transnasional, kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

d. Pemantapan pelaksanaan Polmas dengan cara meningkatkan kemampuan anggota dalam berkomunikasi secara persuasif, edukatif serta peduli terhadap setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

e. Terwujudnya pertumbuhan budaya hukum dalam masyarakat diwilayah hukum Polresta Pekanbaru.

E. Tugas Pokok Sat Lantas Polresta Pekanbaru

Ada 3 yang menjadi tugas pokok Sat Lantas Polresta Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

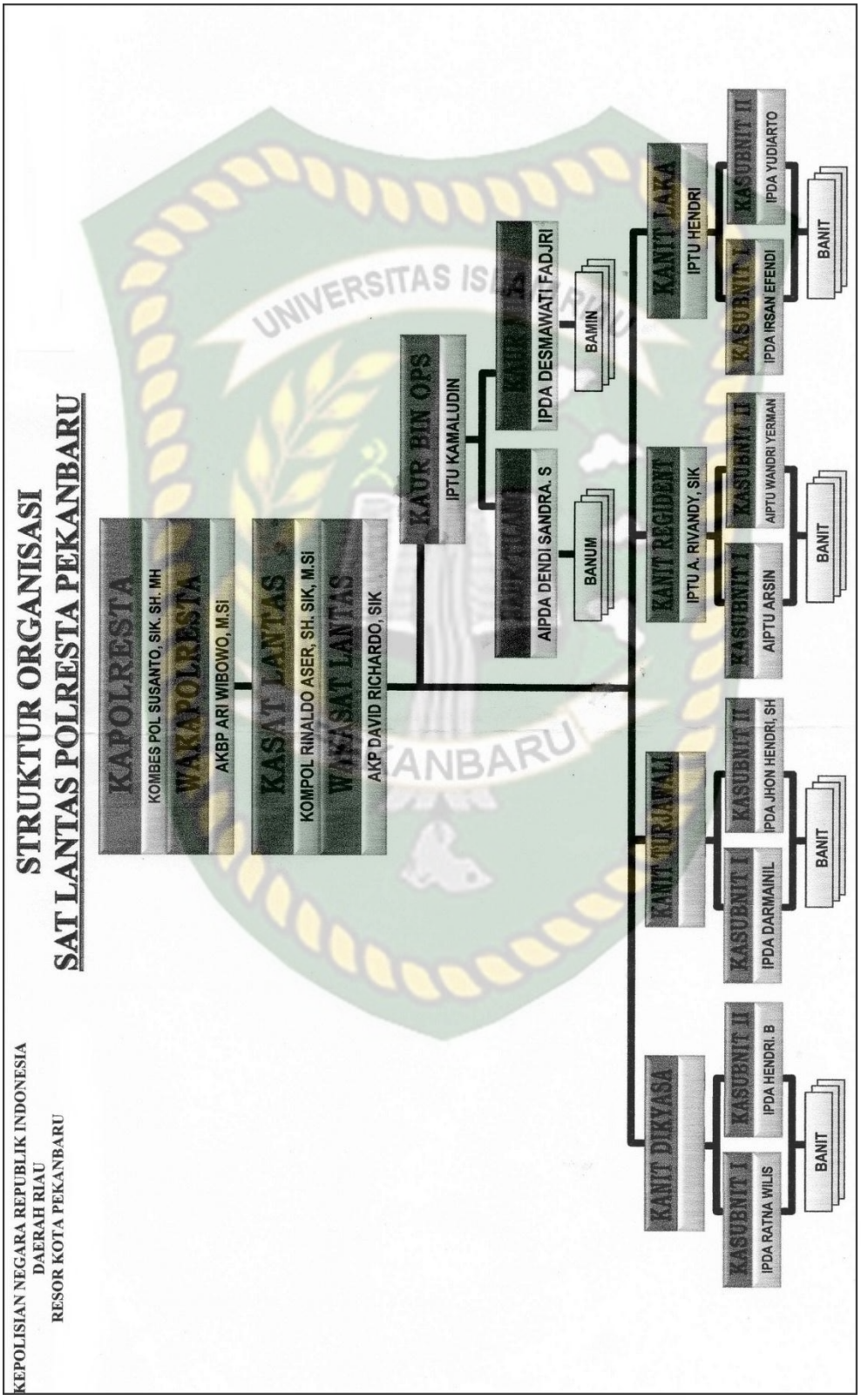
1. Sat Lantas adalah unsure pelaksana utama Polresta yang Berada Di Bawah Kapolresta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Sat Lantas Bertugas Menyelenggarakan/Membina Fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang Meliputi Penjagaan, Pengaturan, Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lalu Lintas Registrasi dan Identifikasi Pengemudi/Kendaraan Bermotor, Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dan Penegakan Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas, Guna Memeihara Keamanan, Ketertiban dan Kelancarana Lalu Lintas.
3. Sat Lantas Dipimpin Oleh Kepala Sat Lantas Disingkat Kasat Lantas yang Bertanggung Jawab Kepada Kapolresta dan Dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari di bawah kendali Waka Polresta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

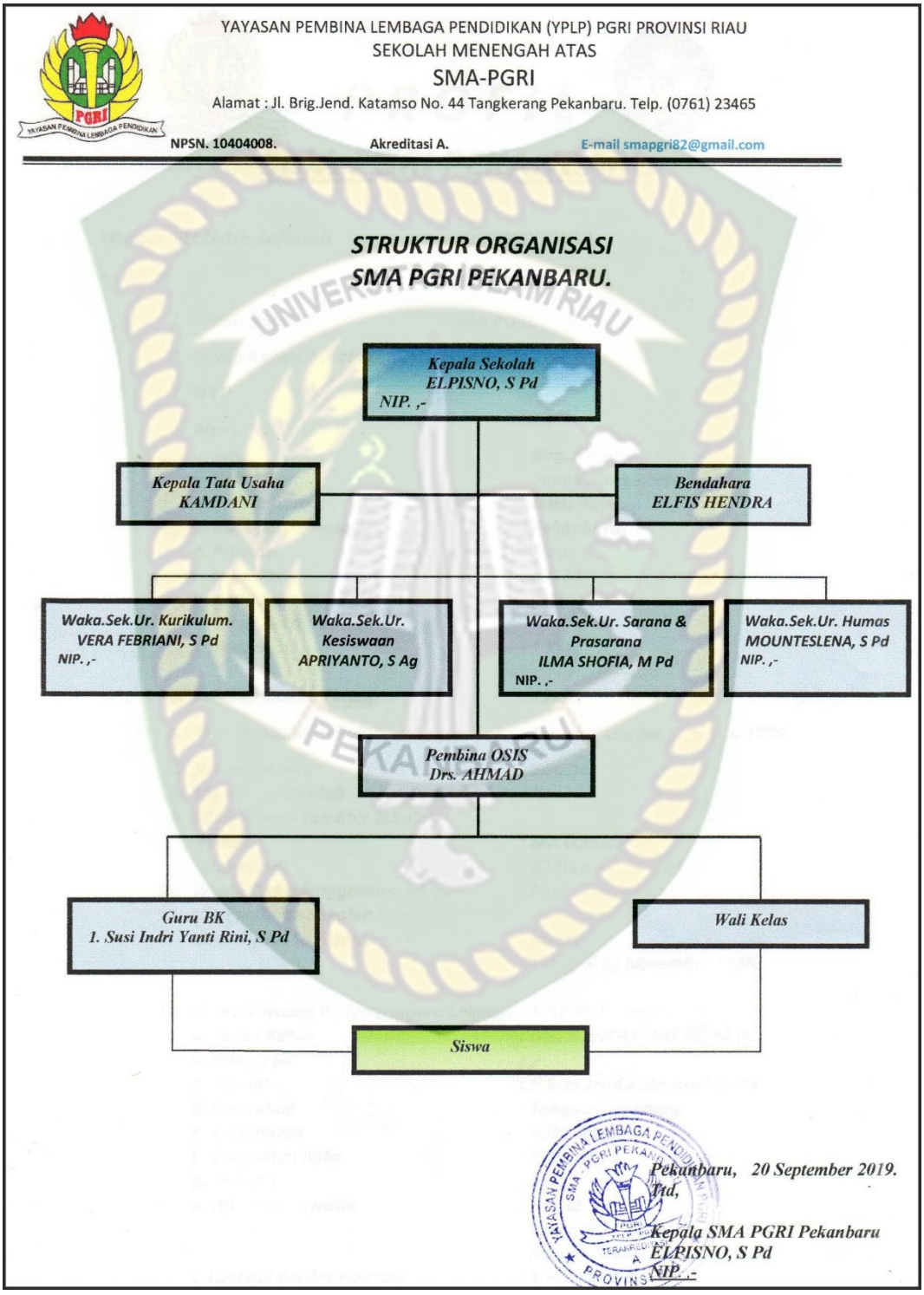
F. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2019.



Sumber: *Sat Lantas Polres Kota Pekanbaru Tahun 2019.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

G. Struktur Organisasi SMA PGRI Kota Pekanbaru Tahun 2019.



Sumber : *SMA PGRI Kota Pekanbaru, Tahun 2019*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru).

No	Nama	Jabatan
1	**2**	**3**
1	IPDA Ratna Wilis	Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru
2	IPDA Hendri B	Kasubnit 2 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru
3	Drs. Kasim	Kepsek SMA 2 Pekanbaru
4	Akmal M.Ag	Wakil Kepsek SMK 2 Muhammadiyah P.Baru
5	Elpisno, S.Pd	Kepsek SMA PGRI Kota Pekanbaru
6	Sarah Ardhini	Perwakilan Siswa/i SMA 2 Pekanbaru
7	Pedro William Alexander	Perwakilan Siswa/i SMA 2 Pekanbaru
8	Nadiva Dwi Marsha	Perwakilan Siswa/i SMA PGRI Pekanbaru
9	Zulkifli Fradinata	Perwakilan Siswa/i SMA PGRI Pekanbaru
10	Intan Ratih Erviana	Perwakilan Siswa/i SMK 2 Muhammadiyah
11	Zikri Hardiansyah Putra	Perwakilan Siswa/i SMK 2 Muhammadiyah
12	Raja Nola Renita	Masyarakat Pengguna Jalan Raya diP.Baru
13	Ria Mardianti	Masyarakat Pengguna Jalan Raya diP.Baru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber :*Olahan Data Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang berasal dari masing-masing instansi baik itu Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru, Kepala Sekola Masing-masing sekolah tempat penelitian, siswa dan siswi masing-masing sekolah tempat penelitian dan masyarakat pengguna jalan, selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan berdasarkan masing-masing informan yang telah disebutkan diatas, maka penulis akan menyajikannya berdasarkan pembahasan sebagai berikut:

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional, serta kebutuhan lain dari masyarakat itu sendiri yang berdampak terhadap aktifitas keseharian. (Kansil, 1984:15)

Perkembangan saat ini, memberikan fakta dilapangan bahwa pemandangan anak dibawah umur menggunakan kendaraan bermotor menjadi sebuah hal yang biasa di temui di jalan raya, masa-masa remaja merupakan masa peralihan dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anak-anak menuju dewasa, fase ini merupakan masa dimana remaja mengalami ketidak stabilan emosi dan perasaan, pada fase ini mereka cenderung untuk mencoba hal-hal yang baru, sehingga perlu diawasi dan diberikan perhatian oleh orang tua, guru dan masyarakat agar terhindar dari hal-hal negative, dan juga dari sifat rasa ingin tahu yang belebihan serta ajakan teman ke hal-hal yang kurang baik.

Salah satu kemungkinan yang cenderung ingin di coba oleh remaja di Indonesia saat ini adalah mengendarai sepeda motor, sekilas tidak ada yang salah dengan rasa keingin tahuan dari para remaja yang memang sedang tumbuh berkembang, tetapi di balik proses tersebut, cenderung ada kelalaian yang dilakukan oleh orang tua di dalamnya, dimana ketika anak tersebut telah belajar dan memahami cara mengendarai sepeda motor, maka hal baru yang akan mereka coba adalah mengendarai sepeda motor tersebut ke jalan raya atau jalanan umum, selain hal tersebut, saat ini remaja di Indonesia cenderung mengalami tren dimana membawa sepeda motor ke sekolah merupakan hal yang sudah biasa dan menjadi pemandangan sehari-hari dimanapun lokasinya di Indonesia.

Fenomena anak menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi ke sekolah tidak jarang mendapatkan dukungan dari orang tua anak tersebut, biasanya hal ini dilakukan atas permintaan dari si anak atau menjadi alasan dari orang tua aktifitas yang padat dan dapat meminimalisir efisiensi waktu, padahal dengan kepenggunaan sepeda motor oleh anak yang masih di bawah umur adalah sebuah bentuk pelanggaran bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 81 ayat 2a yaitu untuk mendapatkan surat izin mengemudi, diwajibkan terlebih dahulu anak memiliki usia 17 (tujuh belas), hal ini untuk mendapatkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Surat Izin Mengemudi type A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D. Dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut, dan melihat fenomena yang terjadi dilapangan, maka dapat dipastikan anak sekolah yang menggunakan kendaraan sepeda motor ke sekolah dengan usia rata-rata dibawah 17 (tujuh belas) tahun tentunya belum memiliki izin atau Surat Izin Mengemudi.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis akan melakukan proses penelitian dan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini, dimana proses penelitian akan dilakukan dengan dasar penggunaan teori Implementasi keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Menurut Teori Edward III (dalam Widodo, 2011:96-110) yang mana dalam pelaksanaan kebijakan, dibutuhkan langkah-langkah seperti melakukan proses Komunikasi (*Comunication*), kesiapan dan ketersediaan dari Sumber Daya (*Resources*), kebijakan dan sikap di dalam instansi tersebut atau disebut sebagai Disposisi (*Disposition*) dan penyusunan mekanisme pelaksanaan kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur atau biasanya langkah ini disebut sebagai Struktur Birokrasi (*Bereucratic Structure*). Dan untuk mengetahui masing-masing hasil penelitian pada langkah-langkah pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut, maka penulis akan menyajikan pembahasannya pada masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijkan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan yang menjadi sasaran (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97), dan untuk mengetahui pelaksanaan proses

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

komunikasi dalam penelitian ini, penulis telah menetapkan item penilaian atau sub indikator yang dijadikan dasar untuk penelitian dilapangan, dimana ke dua sub indikator tersebut adalah:

a. Sosialisasi Terkait UU Nomor 22 Tahun 2009 terkait larangan membawa motor ke Sekolah.
b. Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Sekolah-Sekolah yang ada di Kota Pekanbaru terkait Aturuan yang berlaku.

Untuk mengetahui pelaksanaan dari proses sosialisasi dan koordinasi yang telah di sebutkan diatas, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dilapangan berdasarkan masing-masing point tersebut dan yang pertama adalah pelaksanaan proses sosialisasi dimana pembahannya adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Terkait UU Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Larangan Membawa Motor Ke Sekolah.

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. menurut David A. Goslin (dalam Ihrom, 2004:30) berpendapat bahwa Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berkaitan dengan pembasahan yang penulis lakukan terhadap sub indikator ini yaitu tentang sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, khususnya tentang lalu lintas jalan, kegiatan sosialisasi sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum, dan remaja pada khususnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya untuk mengetahui apakah instansi yang berwenang di dalam proses mensosialisasikan peraturan tentang lalu lintas telah melakukan tugasnya untuk mensosialisasikan aturan-aturan tersebut ke masyarakat, dan untuk mengetahuinya, maka penulis melakukan observasi dan penelitian kelapangan, dimana hasil yang penulis melalui observasi langsung, wawancara dan pengumpulan dokumentasi adalah sebagai berikut.

Hasil penelitian yang pertama adalah penyajian hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di Kantor Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru, dimana informan yang penulis wawancarai dan mintai keterangannya adalah Ibu IPDA Ratna Wilis Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru dan Bapak IPDA Hendri BKasubnit 2 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru, dan hasil wawancara penulis dengan informan tersebut, terkait dengan pelaksanaan proses sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat khususnya kepada sekolah-sekolah di Pekanbaru dengan teman larangan pengunaan sepeda motor ke sekolah bagi siswa/siswi yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi, hasil wawancaranya adalah:

> “Sosialisasi selalu kita lakukan, kita menyadari permasalahan tersebut bukanlah sebuah masalah yang mudah diselesaikan, karna kita tidak bisa semata-mata melakukan larangan dengan sepihak, banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan yang kita lakukan apabila kita langsung menindak siswa/siswi tersebut, selama ini ini kita selalu mengunjungi sekolah-sekolah di Pekanbaru, salah satu hal yang menjadi focus kita adalah tentang keselamatan lalu lintas, khususnya bagi mereka yang masih menginjak usia remaja, kita melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> pendekatan-pendekatan kepada semua pihak, baik itu kepada siswa/siswi ataupun kepada pihak sekolahnya agar bisa bekerja sama untuk mengendalikan permasalahan tentang penggunaan sepeda motor bagi mereka yang belum memiliki surat izin mengemudi" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis juga membahas tentang kegiatan sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru untuk mengendalikan permasalahan penggunaan sepeda motor ke sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak IPDA Hendri BKasubnit 2 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

> "Proses sosialisasi yang kita laksanakan itu membahas tentang keselamatan lalu lintas, pentingnya penggunaan perlengkapan berkendara dengan lengkap, mulai dari helm, sepatu, sarung tangan, dan juga perlengkapan dari surat-surat kendaraan mereka, dan juga tentunya yang utama adalah kepemilikan Surat Izin Mengemudi yang harus terlebih dahulu dimiliki oleh siswa/siswi ini" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Bapak Hendri BKasubnit 2 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Dalam proses wawancara yang penulis lakukan dengan masing-masing perwakilan Polresta Kota Pekanbaru tersebut, penulis menanyakan apakah ada sosialisasi yang dilakukan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan, khususunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis adalah:

> "Benar, dasar dari pelaksanaan sosialisasi ini kan di dasari pada aturan tersebut, kita bergerak di dasari pada aturan yang berlaku di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana salah satunya tentang persyaratan untuk mengemudi dan kepemilikan surat-surat kendaraan bermotor" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Bapak Hendri BKasubnit 2 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembahasan yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah untuk mencari tau apakah proses penegakan terhadap peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas angkutan jalan telah dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru atau belum terlaksana, khususnya dikalangan anak sekolah, dan informan selanjutnya yang penulis akan sajikan hasil wawancaranya dalam penelitian ini adalah perwakilan dari masing-masing sekolah, dan hasil wawancara yang berhasil penulis lakukan adalah dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru, SMA PGRI Kota Pekanbaru serta SMK 2 Muhammadiyah Kota Pekanbaru, dan tanggapan dari masing-masing kepala sekolah terhadap pertanyaan penulis yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah adalah sebagai berikut:

> "Proses sosialisasi memang pernah dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Pekanbaru, mereka datang langsung kesekolah sekitar 5 (lima) orang personil, dimana kegiatan tersebut dilakukan pada hari senin di bulan agustus kemarin, salah satu focus yang mereka sosialisasikan adalah tentang keselamatan lalu lintas dan operasi zebra yang akan dilaksanakan di bulan oktober kemarin, dan kita masih menyimpan dokumentasi mereka pada saat melakukan sosialisasi" (Wawancara, 30 Oktober 2019, Pukul 09.30 Wib, Bapak Drs. Kasim selaku Kepala Sekolah SMA 2 Negeri Kota Pekanbaru)

Melengkapi hasil wawancara yang penulis sajikan diatas, jawaban senada juga disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMK 2 Muhammadiyah Kota Pekanbaru, yang mana mengatakan bahwa proses sosialisasi dilakukan juga disekolah mereka pada bulan agustus kemarin, dimana hasil lengkap tanggapan yang diberikan oleh Bapak Akmal, S.Ag adalah sebagai berikut:

> "Iya benar, kita pernah mendapatkan kunjungan dari Polresta Kota Pekanbaru, mereka datang untuk memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada siswa/siswi kita, saya kira hal-hal seperti ini sifatnya baik dan harus dilakukan secara berkelanjutan" (Wawancara,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

31 Oktober 2019, Pukul 14.00 Wib, Bapak Akmal, S.Ag selaku Wakil Kepala Sekolah SMK 2 Muhammadiyah Kota Pekanbaru)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, hal berbeda disampaikan oleh informan penulis yang berasal dari SMA PGRI Kota Pekanbaru, dimana Kepala Sekolah mengatakan bahwa proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian belum sampai ke sekolah mereka, dan tanggapan hasil wawancara yang diberikan oleh kepala sekolah SMA PGRI Kota Pekanbaru yaitu Bapak Elpisno, S.Pd adalah sebagai berikut:

> "Sekolah kita belum mendapatkan kunjungan tersebut, belum ada kegiatan sosialisasi apapun yang dilakukan di sekolah kita, sejauh ini anak-anak belum mendapatkan pengetahuan khusus yang disampaikan oleh pihak Kepolisian tentang isi dari Undang-Undang Lalu Lintas tersebut, kita berharap kedepannya dapat dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar sekolah kita bisa di kunjungi juga, karna saya kira kegiatan sosialisasi seperti itu sifatnya baik" (Wawancara, 31 Oktober 2019, Pukul 09.30 Wib, Bapak Elpisno, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA PGRI Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan pada pembahasan kegiatan sosialisasi ini bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi memang telah dilakukan oleh pihak Polresta Kota Pekanbaru, tetapi pada faktanya dilapangan, kegiatan tersebut belum berjalan dengan menyeluruh, karna memang kegiatan sosialisasi belum menjangkau keseluruhan sekolah-sekolah menengah atas yang ada di kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak Polresta Kota Pekanbaru dan juga pihak Sekolah SMA 2 Negeri Kota Pekanbaru, pelaksanaan kegiatan sosialisasi memang pernah dilakukan di sekolah tersebut, hal ini senada dengan penjelasan yang diberikan oleh masing-masing perwakilan informan dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kedua belah pihak, baik dari pihak kepolisian ataupun pihak sekolah yang penulis kunjungi SMA 2 Negeri Kota Pekanbaru, dan untuk melengkapi hasil penelitian, maka penulis akan menyajikan bukti dokumentasi proses sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut, dimana penulis mendapatkan data sekunder berbentuk dokumentasi pelaksanaan sosialisasi tersebut dari pihak kepolisian dan sekolah, dimana dokumentasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Yang Dilakukan Polresta Kota Pekanbaru Di Salah Satu Kota Pekanbaru.



Sumber :*Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru, Tahun 2019*

Gambar diatas merupakan dokumentasi proses sosialisasi yang diberikan pihak Polresta Kota Pekanbaru kepada penulis pada saat melakukan penelitian dan wawancara di Kantor Polresta Pekanbaru, dalam gambar diatas dapat dilihat bahwa memang benar pihak Kepolisian Polresta Kotapekanbaru telah menjalankan tugasnya dalam memberikan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, dijelaskan oleh Ibu IPDA Ratna Wilis selaku Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru yang mengatakan bahwa focus dari bahan sosialisasi yang disampaikan kepada anak anak sekolah adalah bagaimana sesunggunya tertib berlalu lintas di jalan raya, apa saja yang harus di taati dan harus dilengkapi untuk berkendara menggunakan sepeda motor, sosialisasi yang disampaikan juga berlaku untuk umum seperti pihak guru-guru yang memang menjadi bagian dari sekolah-sekolah yang di kunjugi tersebut.

Gambar 5.2 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Polresta Kota Pekanbaru di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru.



Sumber :*Dokumentasi Milik SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru, Tahun 2019*

Pada gambar diatas dapat dilihat proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polresta Kota Pekanbaru di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru, sosialisasi yang dilaksanakan di sekolah tersebut tidak hanya berfocus kepada pemberian materi tentang keselamatan berlalu lintas saja, tetapi pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru memberikan atau membagikan helm secara gratis kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

siswa/siswi sekolah tersebut sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam tertib berlalu lintas di jalan raya.

Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat penulis tarik dari pembahasan Sub Indikator yang pertama yaitu tentang pelaksanaan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polresta Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dibeberapa sekolah di Kota Pekanbaru, meskipun masih ada beberapa sekolah yang belum mendapatkan kesempatan atas kunjungan sosialisasi tersebut, secara keseluruhan proses sosialisasi sudah dilakukan secara cukup terlaksana.

b. Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Sekolah Di Kota Pekanbaru Terkait Dengan Aturan Lalu Lintas Yang Berlaku .

Untuk melaksanakan penegakan perundang-undangan tentang aturan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya berkaitan dengan persyaratan yang harus dimiliki oleh masyarakat apabila ingin menggunakan sepeda motor, tentunya pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru tidak dapat hanya mengandalkan kegiatan sosialisasi dan juga proses razia di jalanan, salah satu metode yang dapat dilaksanakan adalah menjalin kerjasama atau koordinasi dengan pihak sekolah bagaimana caranya agar pihak sekolah juga dapat memahami aturan yang berlaku di undang-undang dan menerapkannya kepada siswa/siswi mereka, dan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Ratna Wilis selaku Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru, dimana tanggapan beliau dengan pertanyaan penulis tentang koordinasi yang dilakukan terhadap pihak sekolah untuk mencegah penggunaaan sepeda motor bagi anak dibawah umur adalah berikut ini:

> "Salah satu pembahasan yang kita tekankan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah hal itu, dimana kita mengupayakan agar pihak sekolah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> juga turut aktif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tertib berlalu lintas ini, sejauh ini hasilnya positif memang, dimana pihak sekolah memberlakukan larangan parkir sepeda motor di dalam sekolah, dan saya akui itu jadi salah satu kegiatan atau respon positif dari pihak sekolah, karna dengan adanya larangan tersebut, maka siswa/siswi akan mempertimbangkan kembali niat mereka untuk membawa sepeda motor kesekolah, karna resiko parkir diluar sekolah akan sangat besar" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Melanjutkan pertanyaan tentang koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru terhadap sekolah-sekolah di Pekanbaru, penulis juga menanyakan apakah ada sanksi yang diberikan kepada pihak sekolah apabila memang terbukti memberikan izin kepada anak didik mereka membawa sepeda motor ke sekolah, dan jawaban yang diberikan oleh Ibu Ratna Wilis selaku Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

> "Secara khusus tidak ada sanksi yang diberikan, tetapi kita selalu menjalin komunikasi dengan pihak sekolah-sekolah agar sama-sama membantu dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah, karna bagaimanapun, angka kecelakaan menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kematian anak di usia remaja saat ini" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Melanjutkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, informan selanjutnya yang penulis wawancarai adalah pihak sekolah-sekolah yang dijadikan responden dalam penelitian ini, salah satu tujuan penyajian hasil wawancara ini adalah untuk memastikan apakah memang benar bahwa pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru benar telah melakukan koordinasi atau menjalin komunikasi dengan pihak sekolah agar turun berperan dalam mengurangi penggunaan sepeda motor dikalangan anak sekolah yang belum memiliki kelengkapan persyaratan mengemudi, dan jawaban yang diberikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perwakilan Sekolah SMA Negeri 2 Pekanbaru terkait pertanyaan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

> "Benar, dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan, pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru memang menghimbau kepada sekolah-sekolah agar turut memberikan peran dalam mengurangi penggunaan kendaraan sepeda motor di kalangan remaja atau anak dibawah umum yang belum cukup umur untuk memiliki SIM, hal ini kita respon dengan baik, karna memang tujuannya juga baik, kita sudah lama memberlakukan larangan penggunaan sepeda motor ke sekolah, bisa dilihat tidak ada perkir kendaraan yang berada dilingkungan sekolah SMA 2 Pekanbaru, dan apabila memang siswa/siswi tersebut tetap menggunakan sepeda motor dan parkir diluar, itu bukan lagi wewenang kita untuk memberikan larangan, karna kita sudah memberikan kebijakan di internal sekolah kita" (Wawancara, 30 Oktober 2019, Pukul 09.30 Wib, Bapak Drs. Kasim selaku Kepala Sekolah SMA 2 Negeri Kota Pekanbaru)

Wawancara selanjutnya yang penulis lakukan adalah dengan wakil kepala sekolah SMK 2 Muhammadiyah Kot Pekanbaru, dimana hal senada disampaikan beliau kepada penulis bahwa pihak sekolahnya telah memberlakukan larangan untuk parkir di dalam sekolah, dan untuk mengetahui hasil wawancara lengkapnya, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut:

> "Saya rasa himbauan tersebut diberikan kepada sekolah-sekolah dipekanbaru, dan kita juga ikut andil dalam mensukseskan kegiatan tersebut, SMK Muhammadiyah di Kota Pekanbaru tidak memberikan izin kepada siswa/siswi nya untuk membawa motor kesekolah dengan cara melarang parkir kendaraan roda dua dan empat di dalam sekolah, apabila memang ada siswa/siswi yang tetap mambawa motor kesekolah, silahkan cari parkir lain diluar sekolah dan itu tidak lagi menjadi tanggungjawab dari pihak sekolah" (Wawancara, 31 Oktober 2019, Pukul 14.00 Wib, Bapak Akmal, S.Ag selaku Wakil Kepala Sekolah SMK 2 Muhammadiyah Kota Pekanbaru)

Dengan demikian, maka jelas bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru memang benar telak dilaksanakan, dan dampak dari koordinasi yang telah terjalin tersebut, pihak sekolah memberikan respon dengan adanya larangan parkir

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kendaraan sepeda motor dilingkungan sekolah, dan apabila memang siswa/siswi tetap nekat menggunakan sepeda motor kesekolah, maka dipersilahkan untuk mencari tempat parkir bagi kendaraan mereka sendiri dan hal tersebut diluar dari wewenang dan tanggungjawab sekolah.

Untuk membuktikan hasil wawancara diatas, maka penulis melengkapi hasil penelitian ini dengan melakukan wawancara terhadap beberapa siswa/siswi di masing-masing sekolah untuk mendapatkan jawaban yang paling real dan nyata, dan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan siswa/siswi di SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru terkait dengan adanya aturan atau himbauan yang mana isi dari himbauan tersebut adalah larangan penggunaan sepeda motor ke lingkungan sekolah mereka, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis tersebut adalah berikut ini:

> "Iya, kami memang tidak diperbolehkan menggunakan dan parkir sepeda motor ke dalam lingkungan sekolah, siswa/siswi yang tetap menggunakan sepeda motor lebih memilih tetap membawanya dan parkir diluar pekarangan sekolah, karna memang saat ini masyarakat di sekitar sekolah membuka parkir di halaman rumah-rumah mereka dan kami wajib membayar parkir sebesar Rp 3000/Hari atau untuk sekali parkir di jam sekolah disetiap harinya" (Wawancara, 30 Oktober 2019, Pukul 10.30 Wib, Pedro William Alexander, Siswa SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru)

Melengkapi hasil wawancara diatas, hal senada juga disampaikan oleh siswa/siswi yang bersekolah di SMK 2 Muhammadiyah Kota Pekanbaru, dimana pernyataan yang disampaikan terkait dengan larangan penggunaan sepeda motor ke sekolah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

> "Kami memang tidak boleh parkir di dalam, dan dilarang menggunakan sepeda motor kelingkungan sekolah, makannya kami parkir dirumah warga disekitar sekolah, setiap harinya kami

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memarkirkan kendaraan kami diluar sekolah, dan pihak sekolah mengatakan kalau mereka tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan yang kami titipkan di rumah masyarakat sekitar, dan biaya untuk sekali parkir selama jam sekolah itu biayanya Rp 2000/Motor" (Wawancara, 31 Oktober 2019, Pukul 13.30 Wib, Zikri Hardiansyah Putra, Siswa Sekolah SMK 2 Muhammadiyah Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis hasilkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan peraturan di lingkungan sekolah memang sudah diterapkan oleh pihak Sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru, tetapi untuk mensiasati aturan tersebut, siswa/siwi tetap menggunakan sepeda motor ke sekolah dengan memarkirkan kendaraaan mereka di rumah-rumah masyarakat dilingkungan sekolah dengan membayar jasa keamanan untuk kendaraan mereka, dimana tarif yang ditetapkan bervariasi mulai dari Rp 2000/motor hingga Rp 3000/motor di setiap jam sekolahnya, dan untuk memastikan situasi dilapangan, maka penulis akan melengkapi hasil wawancara dan penelitian ini dengan dokumentasi penulis dilapangan, dimana dokumentasi yang penulis dapatkan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.3 Dokumentasi Kondisi Parkir Kendaraan Diluar Sekolah Yang Dilakukan Siswa/Siswi Untuk Menghindari Larangan Penggunaan Sepeda Motor Di Sekolah Mereka.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber :*Dokumentasi Penulis di Sekolah SMK 2 Muhammadiyah, Kota Pekanbaru, Bulan November tahun 2019*.

Gambar 5.4 Dokumentasi Kondisi Parkir Kendaraan Diluar Sekolah Yang Dilakukan Siswa/Siswi Untuk Menghindari Larangan Penggunaan Sepeda Motor Di Sekolah Mereka.



Sumber : *Dokumentasi Penulis di Sekolah SMA Negeri 2, Kota Pekanbaru, Bulan November tahun 2019*.

Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa untuk menghindari larangan yang diberlakukan oleh pihak masing-masing sekolah mereka, para siswa/siswi lebih memilih menitipkan kendaraan sepeda motor mereka di halaman rumah-rumah masyarakat di lingkungan sekolah berada, hal ini terpaksa mereka lakukan karna pihak sekolah tidak lagi mengizinkan siswa/siswi nya untuk menggunakan sepeda motor dan memarkirkan kendaraan mereka di lingkungan sekolah.

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Polresta Kota Pekanbaru terhadap sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru agar ikut andil dalam menegakkan aturan perundang-undangan terntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlah terlaksanan dengan baik, tetapi cara tersebut ternyata belum efektif untuk mencegah siswa/siswi untuk menggunakan sepeda motor ke sekolah mereka, larangan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diberlakukan oleh pihak sekolah hanya mengamankan sikap dan partisipasi mereka dalam lingkungan instansi mereka sendiri tanpa melihat dampak yang dihasilkan diluar dari kebijakan tersebut.

Kegiatan dalam menggunakan sepeda motor dikalangan remaja atau anak sekolah tetap saja berlangsung dan bisa dikatakan tidak ada dampak yang signifikan, hal ini tentu dapat dilihat dari fakta dilapangan yang mengatakan bahwa siswa/siswi sekolah tetap saja menggunakan kendaraan sepeda motor kesekolah dan hal tersebut sudah pasti juga melanggar aturan yang ada tentang kepemilikikan Surat Izin Mengemudi, karna sudah pasti dengan usia yang rata-rata dibawah 17 tahun, dapat dipastikan siswa/siswi tersebut tidak bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pihak Kepolisian Lalu Lintas Polresta Kota Pekanbaru.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2011:98) mengemukakan bahwa Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Selain itu, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif, sumber daya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.

Hal mendasar yang harus di ketahui dalam pembahasan Sumbe Daya salah satunya adalah komponen manusia di dalam nya sebagai pelaksana atau penggerak, pentingnya Sumber Daya Manusia dalam menjalankan sebuah organisasi yang nantinya di dalam nya ada kebijakan-kebijakan, Sumber Daya Manusia adalah sebagai penggerak utama, sebagai otak dari organisasi tersebut, karna tanpa kehadiran dari Sumber Daya Manusia, maka tidak akan ada yang namanya organisasi.

Sumber daya manusia dalam organisasi sangatlah penting, dimana sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk sebuah kemajuan organisasi tersebut, sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi tersebut, keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya.

Umber daya yang dimaksud dalam proses penelitian ini adalah berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (Personil Kepolisian) dan juga Sumber Daya terkait dengan sarana dan prasarana dalam upaya melaksanakan kebijakan perundang-undangan seperti ketersediaan mobil dinas untuk melaksanakan sosialisasi dan fasilitas pendukung lainnya, dan untuk mengetahui terkait dengan pembahasan tentang Sumber Daya tersebut, maka penulis akan menyajikan pembahasannya berdasarkan dua point tersebut yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Memiliki SDM (Personil Satlantas) yang mencukupi dan profesional dalam melaksanakan kebijakan lalu lintas jalan.
b. Tersedia Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam upaya Pelaksanaan Kebijakan.

Dan untuk mengetahui fakta yang ada pada instansi Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya pada instansi mereka dalam menjalankan proses kebijakan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan perwakilan dari Polresta Kota Pekanbaru, yaitu Ibu IPDA Ratna Wilis yang menjabat sebagai Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru, dan penjelasan yang beliau berikan terkait dengan ketersediaan Sumber Daya baik itu SDM dan Sumber Daya tentang fasilitas pendukung kebijakan seperti sarana dan prasarana pelaksanaan tugas, maka jawaban beliau adalah sebagai berikut:

> "Saya kira mencukupilah kalau untuk menjalankan tugas di bidang Unit Dikyasa, khususnya dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penerapan perundangan-undangan dikalangan pelajar, dan pelaksanaan tugas seperti yang saya katakana sebelumnya, juga telah di jalankan dengan baik, hal ini tentu membuktikan kalau kita punya Sumber Daya Manusia untuk menjalankan tugas dimasing-masing posisi struktur organisasi, karna pada dasarnya, tidak memerlukan banyak personil untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap prilaku remaja dalam penggunaan kendaraan sepeda motor pada usia dini" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Untuk menanggapi pernyataan yan disampaikan oleh Ibu IPDA Ratna Wilis diatas, penulis kembali menanyakan hal yang berkaitan dengan prilaku remaja khususnya para pelajar yang ada di kota Pekanbaru, dimana apabila memang Polresta Kota Pekanbaru memiliki jumlah personil yang cukup untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjalankan tugasnya, kenapa sampai saat ini masih terdapat pelajar dengan bebas menggunakan sepeda motor mereka ke sekolah, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

> "Saya kira hal ini masing menjadi permasalahan sampai saat ini, kita masih mencari solusinya, karna kalau kita memang ingin menerapkan peraturan secara tegas, maka semua anak anak tersebut bisa saja kita tahan kendaraan sepeda motornya, tetapi ada hal lain dibalik itu, saya kira beberapa kali kita telah mengundang perwakilan sekolah untuk melakukan sosialisasi dan rapat untuk membahas ini, dan banyak juga dari kepala sekolah yang tidak setuju dengan larangan penggunaan sepeda motor kesekolah, karna pertimbangan yang mereka berikan adalah jarak tempuh rumah si anak dengan sekolah dan ketersediaan sarana transportasi yang belum memadai, hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi kendala untuk menerapkan peraturan ini secara sepenuhnya" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Dengan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan yang akan dilakukan oleh pihak berwajib harus di imbangin dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang peraturan tersebut, dimana jika pihak kepolisian melakukan larangan secara tegas dengan merazia dan menagkap seluruh kendaraan yang tetap nekad digunakan oleh pelajar kesekolah, maka sebagai dampaknya, Pemerintah Kota Pekanbaru harus menyediakan moda Sarana dan Prasarana Fasilitas Transportasi yang dapat di gunakan oleh pelajar tersebut, khususnya bagi mereka yang memiliki jarak rumah ke sekolah cukup jauh dan harus menggunakan kendaraan.

Melanjutkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, penulis juga menanyakan permasalahan terkait ketersediaan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas seperti kegiatan sosialisasi, razia zebra, dan kegiatan lainnya, dan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana tersebut, maka penulis menanyakan hal tersebut kepada Ibu IPDA Ratna Wilis yang menjabat sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru, dan penjelasan yang beliau berikan terkait dengan ketersediaan Sumber Daya fasilitas pendukung kebijakan seperti sarana dan prasarana pelaksanaan tugas, jawaban beliau adalah sebagai berikut:

> "Tersedia juga, Negara memberikan fasilitas kepada kita untuk menjalankan segala macam bentuk kebijakan yang akan kita laksanakan, ya saya kira fasilitas yang diperlukan juga tidaklah banyak, hanya menggunakan mobil patroli, pencetakan banner, pembelian helm atau sarung tantan dan masker untuk diberikan kepada anak anak sekolah agar mereka terpacu dalam melengkapi kelengkapan berlalu lintas mereka" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Dengan hasil wawancara diatas, dan di dukung dengan hasil observasi langsung dilapangan, maka penulis mendapatkan poin pentingnya bahwa ketersediaan Sumber Daya pada instansi kepolisian Polresta Kota Pekanbaru telah tersedia dengan baik, hal ini juga di ungkapkan pada hasil wawancara yang diberikan oleh Ibu IPDA Ratna Wilis yang mengatakan bahwa ketersediaan Sumber Daya dalam upaya pelaksanaan tugas sudah dilengkapi oleh Negara.

3. Disposisi (*Disposision*)

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan, dimana sikap iniakan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, ketika implementor memiliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Kata disposisi (*disposition*) secara terminologi sepadan dengan kata sikap.Katz (dalam Mahmudi, 2010: 3) mendefinisikan disposisi sebagai kecenderungan untuk berperilaku secara sadar (*consciously*), teratur (*frequently*), dan sukarela (*voluntary*) yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Perilaku-perilaku tersebut antara lain adalah percaya diri, gigih, ingin tahu, dan berpikir fleksibel.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi merupakan suatu kecenderungan atau kebiasaan untuk bersikap terhadap suatu perlakuan tertentu atau dalam kondisi tertentu, kecenderungan-kecenderungan tersebut secara alami membentuk pola-pola sikap atau tingkah laku tertentu pada diri seseorang yang dapat menjadi atribut untuk orang tersebut, dengan kata lain, disposisi itu menunjukkan karakteristik seseorang yang ditunjukkan ketika berinteraksi dengan orang lain secara sadar. Misalnya, dimana seorang personil kepolisian yang mampu memahami situasi dan bahan yang akan disosialisasikan serta dapat memberikan penjelasan yang menarik sehingga si pendengar atau target sosialisasi dapat memahami apa yang akan di sosialisasikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dan dikaitkan dengan proses penelitian yang sedang penulis lakukan, maka hubungan antara disposisi dengan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakter dari personil kepolisian yang melaksanakan tugas dalam upaya Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apakah mereka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memahami apa yang akan mereka kerjakan, memahami isi dari peraturan yang akan mereka tegakkan, dan sikap serta karakter lainnya, untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis akan melakukan sesi wawancara dengan pihak kepolisian yang diwakilkan oleh Ibu IPDA Ratna Wilis selaku Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru, dan penjelasan yang beliau berikan terkait dengan Pemahaman dan Pengetahuan dari masing-masing SDM yang menjalankan tugas terkait dengan peraturan lalu lintas tersebut adalah:

> "Tentu memahami dong, bagaimana bisa kami pergi kesekolah-sekolah untuk menjelaskan pentingnya keselamatan lalu lintas kalau kami sendiri tidak memahami apa saja itu unsur-unsur keselamatan dijalan raya, saya rasa kami sebagai penegak hukum di jalan raya tentunya harus memahami apa saja yang menjadi tupoksi kami, bagaimana peraturannya Standar Operasional Prosedurnya harus di ikuti" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Melanjutkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis melanjutkan pertanyaan yang pelis berikan kepada Ibu IPDA Ratna Wilis selaku Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru, dimana pertanyaan penulis selanjutnya adalah mengenai point-point apa saja yang menjadi focus materi sosialisasi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, dan hasil wawancara yang penulis berikan terkait dengan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

> "Materi Sosialisasi itu tergantung kita mau melakukan sosialisasi bidang apa dulu, apabila kita melakukan sosialisasi keselamatan, maka akan kita focuskan kepada safety riding mereka, bagaimana membaca rambu, norma-norma dijalan raya, saling megalah dan tidak boleh egois, semuanya akan disosialisasikan dan apabila focus sosialisasinya terkait dengan kelengkapan kendaraan sepeda motor, maka akan kita bahas tentang standar kendaraan yang aman untuk digunakan itu seperti apa, dan semuanya itu dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan hasil wawancara diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru mengakui bahwa personil yang mereka miliki telah memahami materi dari isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya tentang bagaimana cara penyampaian agar anak-anak sekolah tersebut dapat memahami aturan tersebut tentunya dengan bahasa yang mengikuti perkembangan jaman agar nantinya dapat berkomunikasi dengan akrab.

Selain dari pembahasan tentang sub indikator di atas, selanjutnya penulis akan menyajikan hasil wawancara dan observasi penulis yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru terhadap anak sekolah yang tetap menggunakan sepeda motor ke sekolah mereka, dalam pembahasan ini tentunya hal yang ditekankan adalah bagaimana cara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian agar anak anak sekolah tersebut tidak menggunakan kendaraan sepeda motor kesekolah mereka, dan jawaban yang diberikan oleh ibu IPDA Ratna Wilis selaku Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

> "Pengawasan kita lakukan, dan cara yang kita lakukan itu bermacam-macam caranya, kita menyediakan personil di titik-titik tertentu yang dianggap menjadi zona tertib berlalu lintas, melakukan razia, melakukan operasi zebra pada waktu-waktu tertentu, hal ini semuanya berkaitan dengan proses pengawasan yang kita lakukan, dan untuk memastikan proses tersebut, saya bisa memberikan dokumentasi pelaksanaan pengawasan dan penertiban dengan cara razia surat-surat kelengkapan berkendara bagi pengguna kendaraan roda dua" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis memberikan pertanyaan tambahan kepada ibu IPDA Ratna Wilis, dimana pertanyaan yang penulis ajukan berkaitan dengan proses pengawasan yang dilakukan dilapangan, dimana salah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

satunya dikatakan adalah melakukan razia, dan pada proses pelaksanaan razia tersebut, apakah ada siswa/siswi yang terjaring razia oleh Polresta Kota Pekanbaru, dan tanggapan yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

> "Ada, banyak remaja yang terjaring razia Opersi Zebra Muara Takus pada bulan yang lalu, kita tidak berikan toleransi, karna memang sebelum melakukan penindakan razia ini, kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak yang masih sekolah, kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar anak-anak remaja tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Berhubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan data sekunder pada tahapan pembahasan terhadap indikator ini, dimana data yang penulis dapatkan dari Kantor Polresta Kota Pekanbaru adalah Dokumentasi disaat pelaksanaan Operasi Zebra Muara Takus yang dilaksanakan pada bulan Oktober dan November Bulan lalu, dalam tahapan pelaksanaan operasi zebra tersebut, Polresta Kota Pekanbaru mengakui bahwa mereka melakukan penangkapan atau menjaring anak sekolah yang menggunakan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan SIM, dan untuk melihat dokumentasinya, maka penulis akan menyajikannya pada gambar dibawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 5.5 Dokumentasi Polresta Kota Pekanbaru Pada Saat Melakukan Operasi Zebra Muara Takus Pada Bulan Oktober 2019.



Sumber :*Satlantas Polresta Kota Pekanbaru, Tahun 2019*

Pada gambar diatas, dapat penulis jelaskan kondisinya adalah pada saat pelaksanaan Gelar Operasi Zebra Muara Takus yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Satlantas Polresta Kota Pekanbaru pada bulan Oktober tahun 2019, dimana dalam foto tersebut terlihat salah seorang anak sekolah yang terjaring razia dan bersiap untuk di tilang oleh pihak kepolisian Polresta Kota Pekanbaru.

Selain dari hasil dokumentasi terkait dengan pelaksanaan Operasi Zebra Muara Takus (OZMT), Ibu IPDA Ratna Wilis memberikan data sekunder kepada penulis berupa foto atau contoh bentuk sosialisasi yang mereka lakukan sebelum menjalankan aksi gelar razia untuk menjaring masyarakat yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan bermotor mereka dan juga menjaring masyarakat yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan bentuk sosialisasi yang disebarkan dimasyarakat tersebut, baik dalam bentuk foto di media sosialial, maupun penyebaran spanduk di jalan-jalan tema sosialisasi yang dilakukan tentunya bersifat milenial atau apa yang menjadi trenz di masyarakat, dimana salah satunya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hal yang sedang tranding adalah film joker, dan momentum tersebutlah yang mendasari tema sosialisasi yang dilakukan menggunakan foto dari salah satu karakter di film joker tersebut, dan untuk melihat bentuk sosialisasi yang dilakukan sebelum melakukan Operasi Zebra Muara Takus tersebut, dokumentasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 5.5 Dokumentasi Bentuk Sosialisasi Sebelum Melakukan Operasi Zebra Muara Takus Pada Bulan Oktober 2019 yang dilaksanakan oleh Polresta Kota Pekanbaru.



Sumber :*Satlantas Polresta Kota Pekanbaru, Tahun 2019*

Penggunaan karakter film diatas sebagai tema sosialisasi tentunya bertujuan untuk mengajak kalangan masyarakat milenial untuk melengkapi dan menumbuhkan kesadaran mereka dalam tertib berlalu lintas, dengan sosialisasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang bersifat milenial tersebut, diharapkan akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat yang masih tergolong muda, khususnya anak sekolah dan anak kuliah yang memang salah satu pengguna sepeda motor terbanyak di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk melanjutnya hasil penelitian pada indikator yang ke 3 (tiga) ini, yaitu pembahasan mengenai Disposisi, penulis kembali melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Satlantas Polresta Pekanbaru yang diwakilkan oleh Bapak IPDA Hendri B, dimana pertanyaan yang penulis berikan kepada beliau adalah berkaitan dengan proses pengawasan yang dilaksanakan, selain dari proses pelaksanaan razia, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pihak Polresta Kota Pekanbaru terhadap anak sekolah yang menggunakan sepeda motor kesekolah, dan jawaban beliau adalah berikut ini:

> "Selain dari proses razia yang telah selesai kita laksanakan, secara rutin kita melakukan penjagaan di beberapa titik persimpangan di seluruh sudut Kota Pekanbaru, khususnya di jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari, hal ini tentunya bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kemacetan dan kecelakaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, hal-hal seperti dilakukan tidak hanya berfocus kepada anak sekolah, tetapi secara umum berlaku untuk seluruh pengguna jalan baik itu kendaraan sepeda motor ataupun roda empat" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Bapak Hendri BKasubnit 2 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Melanjutkan pertanyaan yang penulis berikan kepada Bapak IPDA Hendri B, dimana pertayaan penulis selanjutnya adalah dimana pada saat proses pelaksanaan pengawasan, apabila pihak Kepolisian menemukan pengendara yang menggunakan sepeda motor, tindakan apa yang dilakukan oleh Kepolisian, dan jawaban yang beliau berikan terkait dengan wawancara yang dan pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Saya kira, kita hanya memantau saja, apabila pengendara tersebut menggunakan kelengkapan yang telah sesuai dengan standar seperti penggunaan lampu, helm, spion dan kelengkapan motornya yang standar, maka kita tidak akan memberhentikan atau menangkap mereka, kalau kita menangkap hanya berdasarkan seragam mereka, maka saya kira hari-hari kita tidak akan cukup untuk merazia seluruh siswa/siswi yang ada di Kota Pekanbaru ini setiap harinya" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Bapak Hendri BKasubnit 2 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru belum benar-benar melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap anak sekolah yang memang masih menggunakan kendaraan sepeda motor kesekolah sebagai transportasi mereka, hal ini dibuktikan dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak IPDA Hendri B diatas, dimana beliau mengatakan tidak akan melakukan penangkapan atau memberhentikan pengguna jalan hanya dengan seragam yang mereka kenakan, selama pengendara tersebut memenuhi peryaratan standar keamanan lalu lintas dan kelengkapan kendaraan bermotornya, maka tidak akan menjadi masalah walaupun pengendara tersebut seorang pelajar.

Untuk memastikan hal tersebut, penulis akan melengkapi hasil wawancara pada indikator ini dengan penyajian hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan masyarakat dan juga perwakilan dari masing-masing sekolah, hal ini bertujuan untuk memastikan apakah proses pengawasan yang dilakukan dilapangan telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan penulis yaitu Bapak IPDA Hendri B atau justru informan penulis lainnya memiliki jawaban mereka sendiri terkait dengan proses pengawasan dan razia yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dilapagan, dan informan yang pertama penulis wawancara adalah Nadiva Dwi Masrha, salah satu siswi di Sekolah PGRI Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, dan jawaban yang diberikan oleh informan tersebut terkait dengan pengawasan yang dilakukan Polresta Kota Pekanbaru dilapangan adalah:

> "Kalau ada pak polisinya, kita menghindar, karna takut di razia, biasanya pak polisinya ada di persimpangan itu kalau pagi hari pas kita berangkat kesekolah, mereka selalu ada yang berjaga disetiap persimpangan, dan kalau kita menggunakan helm dan spion dua, saya rasa tidak ada masalah, dan saya sendiri belum pernah terkena razia oleh polisi sewaktu berangkat kesekolah" (Wawancara, Tanggal 31 Oktober 2019, Pukul 10.10 Wib, Nadiva Dwi Masrha)

Melajutkan hasil wawancara diatas, hal serupa disampaikan oleh informan penulis yang berasal dari sekolah lain dikota Pekanbaru, yaitu Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru yang mana informan tersebut adalah Intan Ratih Erviana, siswi kelas 11, yang mana tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh informan tersebut terkait pertanyaan penulis yang menanyakan tentang apakah polisi pernah melakukan pengawasan dan apakah pernah terkena razia oleh polisi ketika menggunakan seragam sekolah, lalu jawaban yang diberikan oleh informan tersebut adalah:

> "Biasanya bapak polisinya berjaga di Simpang SKA lalu di Simpang Ahmad Dahlan, hal itu terjadi selalu di pagi hari ketika saya berangkat sekolah, saya sendiri menggunakan sepeda motor, karna rumah saya berada berdekatan dengan Stadion Utama Riau, tidak ada kendaraan umum dari sana, satu-satunya cara untuk kesekolah adalah menggunakan sepeda motor, dan selama ini saya selalu menghindari polisi, tetapi kendaraan saya lengkap surat-suratnya, hanya saja saya belum memiliki SIM, karna inilah saya selalu takut kalau ketemu dengan polisi di jalan raya, tetapi saya sendiri belum pernah ditangkap atau terkena razia, karna selalu menghindari mereka melalui rute-rute lain yang memang tidak ada penjagaannya" (Wawancara, Tanggal 31 Oktober 2019, Pukul 15.30 Wib, Intan Ratih Erviana)

untuk menyempurnakan hasil penelitian diatas, penulis juga menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan masyarakat, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah memang diperlukan larangan bagi pelajar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk menggunakan sepeda motor, atau justru tanggapan lain yang diberikan oleh masyarakat yang sama-sama sebagai pengguna jalan raya, hal ini penulis tanyakan karna dalam beberapa fenomena dilapangan, pelajar yang menggunakan sepeda motor cenderung berkendara secara ugal-ugalan atau dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan keselamatan pengendara lain, dan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan masyarakat adalah berikut ini:

> "Menurut saya memang perlu di tindak ya, khususnya anak-anak remaja yang berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm dan suara motornya sangat keras, pengendara seperti itu yang harus di tindak tegas dan diberikan sanksi, karna sering saya melihat, mereka masih menggunakan seragam sekolah tetapi sudah berkendara dengan ugal-ugalan, saya rasa itu dampak dari lemahnya pengawasan yang dilakukan orang tua dan pihak Kepolisian kita" (Wawancara, Tanggal 04 November 2019, Pukul 13.00 Wib, Raja Nola Renita)

Hal senada disampaikan oleh informan lainnya yang juga masih berasal dari masyarakat pengguna roda dua dijalan raya, dimana tanggapan yang diberikan oleh Ibu Ria Mardianti terhadap anak sekolah yang menggunakan sepeda motor dijalan raya adalah sebagai berikut:

> "Sering berkendara dengan cara yang tidak wajar menurut saya, apalagi suara motornya sangat berisik dan menganggu sekali bagi pengendara lain, sudah selayaknya mereka diberikan sanksi, apalagi saya kira anak anak sekolah tersebut tidak memiliki SIM karna usianya saja belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM, saya berharap ada tindakan tegas yang diberikan kepada pengendara yang tidak memperhatikan keselamatan orang lain" (Wawancara, Tanggal 04 November 2019, Pukul 13.00 Wib, Ria Mardianti)

Hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan, tidak saja mengambil data dalam bentuk wawancara yang dilakukan kepada informan petugas kepolisian, tetapi Cuma mencakup hasil wawancara yang penulis lakuukan terhadap masyarakat yang juga pengguna jalan raya, dan dengan hasil wawancara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang telah disajika diatas, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa masyarakat pada dasarnya juga tidak setuju dengan prilaku anak sekolah yang menggunakan sepeda motor ke sekolah mereka, hal ini di ungkapkan informan cenderung bisa membahayakan diri mereka dan juga pengguna jalan lain, karna cara remaja menggunakan sepeda motor masih tergolong belum dapat mengontrol emosi dan cenderung kebut-kebutan yang bisa menyebabkan kecelakaan baik atas dirinya sendiri ataupun berdampak kepada orang lain pengguna jalan raya.

Dari keseluruhan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas, dan ditambah dengan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, maka dapat penulis simpulkan hasil dari proses pelaksanaan pengawasan pada pembahasan sub indikator yang ke 2 (dua) pada pembahasan disposisi, dimana pelaksanaan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas Polresta Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari fakta dilapangan, dimana masih banyak dan cenderung rata-rata anak Sekolah di Pekanbaru masih menggunakan sepeda motor ke sekolah mereka, sedangkan berdasarkan aturan dan estimasi usia rata-rata anak sekolah menengah atas, dapat dipastikan rata-rata usia mereka belum genap pada usia 17 (tujuh belas) tahun, dan dengan demikian, tentunya mereka juga bisa dipastikan belum layak mendapatkan Surat Izin Mengemudi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, aspek pertama adalah mekanisme,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP), aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Kaitan antara indikator diatas dengan pembahasan skripsi ini adalah pembahasan mengenai penetapan SOP dalam upaya pelaksanaan kegiatan penerapan aturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pelaksanaan pemberian sanksi kepada sekolah-sekolah yang tidak memberikan sikap tegas terhadap siswa/siswi nya untuk tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah, dan untuk memastikan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, maka hasil pembahasannya akan penulis sajikan dibawah ini:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk menjalankan kebijakan, tentunya membutuhkan panduan dalam pelaksanannya, tidak berbeda dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang di menjadi tugas pihak Kepolisian Republik Indonesia, khusus pada pembahasan kali ini, yang menjadi topik penyajian hasil penelitian adalah *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dimana penulis menanyakan apakah pihak Satlantas Polresta Kota Pekanbaru memiliki SOP dalam pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan tanggapan yang diberikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh ibu IPDA Ratna Wilis selaku Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru terkait dengan penetapan SOP dalam menegakkan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

> "Tentunya, kita bertindak seusai dengan Standar Operasional Prosedur, dan arahan-arahan yang diberikan oleh pimpinan, apabila hari ini kita bertugas melakukan razia operasi zebra contohnya, kita akan di berikan *Briefing* atau arahan oleh pimpinan atau komandan, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan khususnya untuk anak sekolah, apabila kita melakukan patroli, dan menemukan pelanggar lalu lintas, kita tidak boleh membuat mereka panik atau mengejar mereka secara brutal, nantinya akan berdampak kepada kesadaran si pelanggar yang bisa menyebabkan kecelakaan karna kepanikan tersebut, kita selalu di arahkan untuk bertindak secara pendekatan atau humanis, kecuali memang terindikasi ada pelanggaran berat yang dilakukan, seperti membawa narkoba, senjata api atau lain sebagainya, hal tersebut memerlukan tindakan yang cepat untuk pengamanan barang bukti dan tersangkanya untuk di tindak lanjuti lebih lanjut" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Melanjutkan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas, penulis meminta data kepada informan yaitu Ibu IPDA Ratna Wilis terkait dengan SOP pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya pada saat pelaksanaan pengawasan dan penindakan atau operasi Zebra seperti yang pernah dilakukan pada bulan lalu, dan penjelasan atau data yang diberikan oleh beliau terkait dengan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Operasi Razia adalah sebagai berikut:

Pengaturan mengenai pemeriksaan atau yang sering disebut razia kendaraan bermotor di jalan dapat kita temui dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dimana di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
b. Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
c. Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
d. Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

a. Surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor
b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
c. Fisik kendaraan bermotor
d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
e. Izin penyelenggaraan angkutan

Kemudian, dalam pasal 10 peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik indonesia secara berkala atau incidental.

Petugas kepolisian negara republik indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental atas dasar operasi kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas, yang dikeluarkan oleh:

a. Atasan petugas kepolisian negara republik indonesia bagi petugas kepolisian negara republik indonesia; dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Atasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bagi penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Surat perintah tugas paling sedikitnya memuat:

a. Alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor;
b. Waktu pemeriksaan kendaraan bermotor;
c. Tempat pemeriksaan kendaraan bermotor;
d. Penanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor; dan
e. Daftar petugas kepolisian negara republik indonesia dan/atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.
f. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
g. Petugas pemeriksanya sendiri pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

Pada dasarnya, prosedur pemeriksaan (razia) yang dilakukan pada siang hari maupun malam hari sama saja, hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:

a. Menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan
b. Memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan
c. Memakai rompi yang memantulkan cahaya

Ibu ipda ratna wilis mengatakan bahwa pemeriksaan atau razia kendaraan bermotor di malam hari, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 22 peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 yang berbunyi:

a. Pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, kecuali tertangkap tangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan
c. Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan
d. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan
e. Dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
    1. Menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3),
    2. Memasang lampu isyarat bercahaya kuning, dan
    3. Memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Penjelasan yang disampaikan diatas merupakan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam upaya penerapan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan Standar Operasional Prosedur diatas menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara keseluruhan dimanapun di wilayah Indonesia, temasuk Kota Pekanbaru.

Dengan penyajian hasil penelitian diatas, maka dapat di simpulkan bawah pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru memang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan mereka yang berpedoman terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, SOP yang disajikan diatas berkaitan dengan penegakan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pemberian Sanksi Kepada Sekola Yang Tetap Memberikan Izin Kepada Siswanya Untuk Menggunakan Sepeda Motor Ke Sekolah.

Maksud dari pembahasan ini adalah untuk memastikan apakah pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru membuat kebijakan terkait dengan penerapan sanksi yang akan diberikan kepada pihak Sekolah apabila memang ternyata sekolah memberikan izin secara terbuka untuk anak didiknya menggunakan sepeda motor ke sekolah mereka.

Untuk menyajikan hasil pembahasan pada penelitian ini, penulis akan menggali informasi dari masing-masing informan yang di anggap memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan informan pertama tentunya dari pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Ibu IPDA Ratna Wilis selaku Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru, dimana tanggapan beliau terkait dengan pertanyaan penulis seputar pemberian sanksi terhadap sekolah yang tetap memberikan izin kepada siswa/siswinya untuk menggunakan sepeda motor kesekolah, dan jawaban beliau adalah:

> "Tidak ada, kita belum bertindak sejauh ini, dan itu bukan wewenang kita, sudah berbeda fungsi dan tugasnya untuk memberikan sanksi kepada pihak Sekolah, urusan terhadap sekolah itu bisa menjadi wewenang dari Dinas Pendidikan atau Kementrian Pendidikan Republik Indonesia, bukan ranah dari pihak kepolisian lagi untuk memberika sanksi kepada sebuah instansi, walaupun mereka memberikan izin untuk siswa sisiwi nya menggunakan sepeda motor" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga mengajukan pertanyaan tentang apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kepolsiian Polresta Kota Pekanbaru kepada pihak Sekolah agar tidak memberikan ruang kepada siswa siswi nya dengan bebas menggunakan sepeda motor ke sekolah, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

> "Kalau himbauan ada, tetapi tidak dengan membebankan tugas kepada pihak sekolah, kita hanya berdiskusi saja, bersosialisasi, bagaimana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> cara terbaik untuk menangani permasalahan ini, dan pihak sekolah meresponnya dengan baik, mereka merupaya mengurangi penggunaan sepeda motor kesekolah dengan melarang anak didiknya memarkirkan kendaraan mereka di areal pekarangan sekolah, dengan kebijakan tersebut, diharapkan nantinya angka penggunaan sepeda motor dapat berkurang" (Wawancara, 28 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib, Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru)

Untuk melengkapi hasil wawancara yang telah tersaji diatas, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak masing-masing sekolah untuk memastikan kebijakan terkait dengan pemberian sanksi tersebut, dan jawaban yang diberikan oleh masing-masing perwakilan dari sekolah yang penulis teliti yaitu SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru, SMA PGRI Kota Pekanbaru, dan SMK Muahammadiyah 2 Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

> "Tidak ada sanksi, dan apabila kami mengizinkan anak didik kami menggunakan sepeda motor, saya kira hal tersebut tidak ada masalah sama sekali, dan saya rasa beda wewenangah, bukan wewenang pihak kepolisian mengurusi instansi pendidikan, jadi mereka tidak dapat memberikan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan instansi pendidikan, tupoksinya berbeda, kita punya kepala sendiri dan mereka juga punya kepala sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya" (Wawancara, 30 Oktober 2019, Pukul 09.30 Wib, Bapak Drs. Kasim selaku Kepala Sekolah SMA 2 Negeri Kota Pekanbaru)

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Kepada Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru, dimana beliau mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak pernah memberikan atau menghimbau akan memberikan sanksi kepada sekolah mereka, dan upaya yang mereka lakukan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor kesekolah murni atas dasar kebijakan sekolah, bukan kebijakan dari pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru, hanya saja memang di akui bahwa sekolah dan kepolisian polresta Kota Pekanbaru pernah melakukan koordinasi terkait hal tersebut, tetapi sifatnya tidak memaksa dan memberikan ruang kepada pihak sekolah untuk menentukan arah kebijakannya kemana, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk memastikan tanggapan hasil wawancara yang diberikan oleh Bapak Akmal S.Ag selaku Wakil Kepala Sekolah SMK 2 Muhammadiyah Kota Pekanbaru, penulis akan menyajikan hasil wawancaranya sebagai berikut:

> "Tidak ada sanksi, kebijakan pelarangan atau pemberian izin kepada siswa/siswi kami untuk menggunakan sepeda motor belum sampai kepada tindakan pemberian sanksi, kami juga tidak bisa memberikan sanksi kepada siswa kami yang tetap menggunakan sepeda motor ke sekolah, karna memang bukan ranah kami disana, tetapi, untuk meminimalisis atau mengurangi angka kecelakaan terhadap anak usia dini khususnya pelajar, sekolah memberikan andilnya dalam hal yang berbeda, kami sadar peran kami sangat diperlukan dalam hal tersebut, dengan demikian, maka kami menerapkan kebijakan yang mana kami melarang mereka memanfaatkan lingkungan sekolah untuk memarkirakn kendaraannya, dengan demikian, diharapkan mereka akan takut menggunakan sepeda motor kesekolah karna kebingungan untuk memarkirkan kendaraannya dimana, dan saya rasa kebijakan ini sedikit banyaknya dapat mengurangi angka penggunaan sepeda motor kesekolah, khususnya di sekolah kami " (Wawancara, 31 Oktober 2019, Pukul 14.00 Wib, Bapak Akmal, S.Ag selaku Wakil Kepala Sekolah SMK 2 Muhammadiyah Kota Pekanbaru)

Penyajian hasil wawancara yang terakhir penulis lakukan adalah dengan kepala sekolah SMA PGRI Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Elpisno, S.Pd dimana tanggapan beliau tentang pemberian sanksi kepada sekolah apabila mengizinkan anak didiknya menggunakan sepeda motor kesekolah adalah sebagai berikut:

> "Sampai saat ini, siswa/siswi kami tetap menggunakan sepeda motor kesekolah, dan kami mengizinkan mereka untuk parkir di dalam sekolah, karna parkir diluar sekolah resikonya sangat tinggi baik terhadap kehilangan ataupun kerusakan dari kendaraan tersebut, secara pasti saya katakana, kami tidak pernah menerima kunjungan sosialisasi, jadi kami rasa kami berhak untuk mengatakan bahwa kami tidak mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru, dan apabila ada upaya pemberian sanksi kepada sekolah, saya kira ini perlu di luruskan lagi, memangnya wewenang pihak kepolisia memberikan sanksi kepada sekolah itu atas dasar apa, tupoksi mereka apa untuk hal tersebut, dan selama ini tidak ada sanksi yang kami terima, seperti yang saya katakana, jangankan sanksi, sosialisasi untuk hal-hal keselamatan tentang lalu lintas saja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak pernah kami terima dari mereka" (Wawancara, 31 Oktober 2019, Pukul 09.30 Wib, Bapak Elpisno, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA PGRI Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Elpisno, S.Pd diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemberian sanksi kepada instansi sekolah memang bukan ranah dari pihak kepolisian, hal tersebut bisa menjadi kebijakan yang harusnya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kementrian Pendidikan Negara Republik Indinesia, dan beliau mengatakan bawah sampai saat ini siswa sisiwi nya masing menggunakan sepeda motor kesekolah dan tidak ada larangan yang diberikan terhadap hal tersebut, serta harapan yang beliau sampaikan adalah agar pihak Polresta Kota Pekanbaru melakukan proses sosialisasi secara menyeluruh ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, karna selama ini SMA PGRI tidak pernah menerima tindakan sosialisasi apapun dari Satlantas Polresta Kota Pekanbaru terkait dengan kebijakan lalu lintas.

Dengan hasil dari seluruh wawancara diatas, dan dilengkapi dengan observasi langsung yang penulis lakukan di lapangan, maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pemberian sanksi kepada sekolah-sekolah yang mengizinkan siswa sisiwi nya menggunakan sepeda motor ke sekolah tidak terlaksana sama sekali oleh pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan dalam pemberian sanksi tersebut khususnya sanksi kepada instansi pendidikan, bukan lagi menjadi wewenang dari pihak Kepolisian.

Jadi secara keseluruhan, yang berkaitan dengan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru), khususnya pengemudi yang dibawah umur dan belum memiliki surat izin mengemudi yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat diperoleh dari pihak Kepolisian. Di dalam penelitian yang penulis angkat ini adalah pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang banyak berkeliaran di jalan umum, khususny pada pengemudi yang masih duduk dibangku sekolah SMA, yang sudah pasti belum memiliki surat izin mengemudi.

Hal ini tentunya harus mendapatkan pengawasan ketat dari pihak Kepolisian dan tentunya wajib diberikan sanksi karna hal ini tentunya sudah melanggar peraturan yang berlaku. Tetapi berdasarkan permasalahan yang penulis dapatkan di lapangan, jika pihak kepolisian yang hanya memberikan pengawasan dan sanksi, itu tentunya tidak bisa terlaksana secara optimal, tanpa adanya dan kerja sama dari pihak orang tua dan juga pihak sekolah. Karna walaupun secara tidak langsung pihak sekolah memberikan izin kepada siswanya untuk membawa kendaraan pribadi dengan cara memarkirkan di halaman diluar sekolah. Sedangkan alasan dari pihak orang tua dari pengemudi di bawah umur ini, bahwa mereka tidak ada pilihan lain selain mengizinkan anak-anak mereka menggunakan motor untuk pergi sekolah dikarnakan jarak sekolah yang jauh dari rumah, dan orang tuanya tidak sempat mengantarkan anaknya ke sekolah, hal inilah terkadang membuat pihak kepolisian tidak bisa memberikan sanksi tegas terhadap pengemudi dibawah umur.

Jadi dengan permasalahan yang penulis paparkan di atas, penulis berharap kepada orang tua, dan pihak sekolah untuk bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar melarang siswa/siswinya menggunakan kendaraan pribadi, tetapi pihak sekolah juga harus menyediakan fasilitas kendaraan pribadi sekolah untuk anter jemput siswa/siswinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Pihak Kepolisia Polresta Kota Pekanbaru dalam MelaksanakanPeraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru).

Dalam upaya menjalankan sebuah peraturan yang berkaitan dengan masyarakat umum khususnya tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan remaja dengan penggunaan sepeda motor ke sekolah, tentunya Polresta Kota Pekanbaru mengalami beberapa hambatan yang mengakibatkan kurang terlaksananya kebijakan tersebut, dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru dalam upaya melaksanakan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu IPDA Ratna Wilis, Kasubnit 1 Dikyasa Polresta Kota Pekanbaru, hambatan yang dialami untuk menerapkan penegakan peraturan tentang lalu lintas kepada anak sekolah yang menggunakan sepeda motor adalah masalah sarana dan prasarana transportasi umum yang belum lengkap di Kota Pekanbaru, hal ini menjadi dilema terbesar yang di hadapi pihak Kepolisian, apabila mereka melarang secara total penggunaan sepeda motor ke sekolah, maka yang menjadi dampak nya adalah banyak siswa/siswi yang akan terlambat atau tidak bisa berangkat ke sekolah karna transportasi umum belum merata di seluruh Kota Pekanbaru, dan jarak antara rumah siswa siswi kesekolah menjadi salah satu alasan untuk penggunaan transportasi umum tersebut. Dampak dari sarana dan prasarana angkutan umum yang belum merata di Kota Pekanbaru, maka banyak anak remaja yang menggunaka sepeda motor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesekolah dan hal ini menjadi kebiasaan sehingga diluar jam sekolah pun mereka akan menjadikan sepeda motor sebagai transportasi utama mereka untuk beraktivitas, hal ini tentunya menjadi penyebab banyaknya anak yang belum memiliki SIM tetapi telah bebas berkendara di jalan raya.

2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masing-masing orang tua si anak tersebut, dimana dengan usia yang masih remaja dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi, tetapi para orang tua sudah memberikan izin kepada anaknya untuk menggunakan sepeda motor bahkan dengan sengaja membelikan mereka sepeda motor mulai dari yang kecil hingga sepeda motor dengan kapasitas besar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dan telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian dilapangan dengan metode observasi ataupun dengan cara melakukan wawancara terhadap informan penulis, maka kesimpulan yang didapakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Akuntan Jalan di Kota Pekanbaru khususnya terkait dengan persyaratan mengemudi yang harus dimiliki setiap pengendara sepeda motor belum berjalan cukup baik, temuan dilapangan yang berhasil penulis teliti memberikan fakta bahwa pelaksanaan penerapan perundangan-undangan tersebut hanya bisa dihimbau dengan cara melakukan sosialisasi kepada pelajar melalui gerakan sosialisasi kesekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh Kepolisian Satlantas Polresta Kota Pekanbaru, tetapi untuk menindak secara langsung atau melakukan pelarangan secara langsung kepada anak sekolah tersebut, pihak Kepolisian belum bisa melakukan kebijakan tersebut, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang nantinya menjadi dampak dari penindakan seluruh anak sekolah yang menggunakan sepeda motor kesekolah, dimana faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan peraturan di dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perundang-undangan tersebut adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana angkutan umum di Kota Pekanbaru, sehingga apabila anak sekolah dilarang menggunakan sepeda motor ke sekolah, ditakutkan akan menimbulkan permasalahan baru yang memiliki dampak lebih luas terkait dengan pendidikan si anak tersebut, dengan demikian, upaya yang dilakukan Polresta Kota Pekanbaru untuk menindak lanjuti peraturan perundang-undangan tersebut kepada siswa-siswi sekolah adalah dengan mensosialisasikan tertib berlalu lintas dan melengkapi seluruh kelengkapan kendaraan bermotor mereka.

2. Sementara itu, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Polresta Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan peraturan tentang lalu lintas jalan adalah ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum yang belum lengkap di Kota Pekanbaru, hal ini menjadi dilema terbesar yang di hadapi pihak Kepolisian, apabila mereka melarang secara total penggunaan sepeda motor ke sekolah, maka yang menjadi dampak nya adalah banyak siswa/siswi yang akan terlambat atau tidak bisa berangkat ke sekolah karna transportasi umum belum merata di seluruh Kota Pekanbaru, dan jarak antara rumah siswa siswi kesekolah menjadi salah satu alasan untuk penggunaan transportasi umum tersebut. Dan kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masing-masing orang tua si anak tersebut, dimana dengan usia yang masih remaja dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi, tetapi para orang tua sudah memberikan izin kepada anaknya untuk menggunakan sepeda motor bahkan dengan sengaja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membelikan mereka sepeda motor mulai dari yang kecil hingga sepeda motor dengan kapasitas besar.

B. Saran

Didasari pada hasil penelitian yang telah dihasilkan diatas, maka penulis akan memberikan saran yang nantinya bermanfaat untuk pihak-pihak terkait khususnya Pihak Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru, Pihak Sekolah, dan Pelajar yang menjadi informan dalam penelitian ini, dimana saran yang penulis berikan atas hasil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis:
   a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti isu persyaratan pengemudi di Kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitiannya adalah remaja tingkat SMA/SMK, diharapkan agar melakukan penelitian dengan mengangkat isu tentang Implementasi Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini dikarenakan penelitian yang penulis lakukan saat ini hanya terbatas di wilayah tingkat SMA saja, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas, tentunya harus mencakup keseluruhan tingkatan remja baik dari SD-SMA.
   b. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang sama dikarenakan hasil penelitian yang penulis dapatkan saat ini secara umum belum mendapatkan jawaban yang diharapkan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan persyaratan izin mengemudi belum terlaksana secara optimal oleh pihak yang berwenang, hal ini dikarnakan masih banyak remaja sekolah khususnya tingkat SMA/SMK yang belum memiliki SIM tetapi sudah menggunakan kendaraan di jalan lalu lintas, bukan hanya itu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yaitu berkendara secara ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, dan lain sebagainya.

2. Saran Akademis

   Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama yaitu tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara atau penyebaran kuesioner guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

3. Saran Praktis

   a. Disarankan kepada pihak Kepolisian mengeluarkan kebijakan tentang penerbitan Surat Izin Mengemudi bagi anak di usia lebih muda, atau Surat Izin Mengemudi terbatas bagi kalanga pelajar di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia, hal ini tentunya menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan, dimana dengan Surat Izin Mengemudi Terbatas yang penulis maksud adalah, penggunaan Surat Izin Mengemudi tersebut hanya berlaku ketika si anak dalam situasi jam belajar sekolah atau saat menggunakan seragam sekolah saja, diluar dari itu, maka SIM tersebut tidak berlaku.

b. Diharapkan kepada pihak sekolah untuk memberikan kebijakan kepada sisiwanya, bagi siswa yang memang memiliki domisili terdekat ke sekolah agar di himbau tidak menggunakan sepeda motor kesekolah khususnya bagi siswa sisiwi yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

c. Kepada pihak orang tua pelajar, agar turut aktif berperan dalam upaya mengurangi penggunaan sepeda motor dikalangan remaja yang mengakibatkan tingginya angka kecelakaan di usia dini, cara yang dapat dilakukan tentunya dengan tidan memfasilitasi anak dengan membelikan mereka sepeda motor, dan lebih memilih mereka menggunakan trasportasi umum atau menggunakan jasa angkutan lain untuk transportasi mereka berangkat ke sekolah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahab, Solichin.2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung*: CV. Alfabeta.

Alamsyah, D. 2011. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia

Creswell, Jhon W. 2016. Re*search Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*. Gava Media: Yogyakarta

Kansil,S.H,. 1984 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka. Jakarta.

M. Manulang. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan 22*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2012. *Pengantar teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nurdin Usman, 2002, Konteks implementasi berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakart

Rahyunir Rauf & Yusri Munaf. 2015. Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia. Pekanbaru: Zanafa Publishing

Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama.

Sitorus & Panjaitan. 2009. *Manajemen*. Jakarta: Sagung Seto.

_____. 2011. *Manajemen*. Jakarta: Sagung Seto.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

_____. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

Terry, George R. 1977. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media

B. Dokumentasi Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :